KOMUNITAS

Edisi 02.V / Agustus 2009

Komunikatif, Akrab dan Santun

Terbit Sejak 4 Oktober 2004. No SPS: 417/2004/10/B/2007

Ade Saprudin, Pengusah

Saat ini rasa nasionalisme sudah jauh berkurang, ya rakyatnya, ya pemerintahnya sendiri. Dalam arti, pemerintah kurang respek pada tindakan cinta tanah air. Kalau rakyatnya, mungkin penghasilannya masih jauh dari cukup, sehingga sibuk mencari makan sehari-hari.

Pemerintah harusnya lebih banyak mendorong kegiatan-kegiatan yang menumbuhkan rasa cintah tanah air dan nasionalisme. Karena rasa nasionalisme bukan tertujua pada materi, tapi jiwa, semangat.

Misalnya, dalam merayakan 17-an, pemerintah harusnya lebih memanfaatkan momentum ini untuk membangkitkan rasa nasionalisme. Bukan cuma seremonial belaka.

Nyingir



Bulan Ramadhan, bulan puasa, bulan penuh berkah. Paling tidak, warga Indonesia akan berpenampilan lebih sopan, tak pamer aurat.

Tak lupa buka puasa dengan yang manis. Buka bersama pun digelar, pejabat kumpul di resto-resto terkenal.

Menu mewah puluhan ribu rupiah per orang disantap.



Terima kasih ya Allah, walaupun cuma nasi rames pemberian orang dan di emperan toko, saya masih bisa menikmati buka puasa.

Kalau soal puasa sih bukan masalah ya Allah. Karena kami biasa puasa sepanjang tahun. Kapan ya pejabat ngajak buka puasa bareng di emperan toko?

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Bukan Biaya Operasional Pengelola Pendidikan

Dibagikan GRATIS

BAJU SERAGAM
6 Stel, Putih-Putih, Merah Putih, Batik, Muslim, Pramuka Olah Raga
Rp250 ribu

BUKU
Buku Pelajaran dan Buku Fokus
Rp400 ribu

ONGKOS
Transport dan Uang Saku
Rp140 ribu

TAS DAN BUKU
Tas, Buku Tulis, Pinsil, Penghapus, Pinsil Warna, Penggaris, Pulpen, dan Tempat Pinsil
Rp80 ribu

SEPATU
Sepatu & Kaos Kaki
Rp40 ribu

Catatan ibu rumah tangga:
Gaji bapak Rp1,03 juta - anak masuk sekolah, sisanya Rp120 ribu. Belum dapur Rp750 ribu, Kontrakan Rp300 ribu. Ngutang kemana lagi?

Refleksi 64 Tahun Bangsaku Merdeka

"Tanah air adalah sebuah proyek yang kita tempuh bersama-sama, kau dan aku. Sebuah kemungkinan yang menyingsing, sebuah cita-cita yang digayuh generasi demi generasi, sebuah impian yang kita jalani dengan tungkai kaki yang kadang capek dan kesadaran yang kadang tanpa fokus. Tanah air adalah sebuah ruang masa kini yang kita arungi, karena ada harapan untuk kita kelak."

Goenawan Muhammad







Oleh : **Emboy Sumargana**

Gelora Romantik Agustusan dengan alunan suara melankolis "selendang sutera" atau "sepasang mata bola" di hari-hari menjelang peringatan kemerdekaan republik ini terasa tenggelam dibalik gemuruh lagu "Online-nya" Saykoji atau "Tak Gendong"-nya Mbah Surip. Juga hiruk pikuk dunia infotainment yang mengabarkan artis ini baru saja bercerai dan artis itu sedang menjalin hubungan kasih dengan artis yang lebih muda Belum lagi geliat aktif komunikasi online dengan koneksi internet yang sungguh cepat, menghubungkan seseorang dengan orang lain di benua lain, layaknya bercakap berhadapan wajah.

Tak hadir lagi kenaifan seorang pemuda tanggung yang baru pertama kali menggenggam bedil, salah tembak sasaran. Jiwa sang pemuda dibakar oleh semangat yang dipompakan oleh pidato-pidato Bung Karno. Rak ada lagi sejenis kisah asmara yang terukir dari kiriman surat cinta di garis depan yang mengalir ke dapur-dapur umum lewat kurir bersama "setumpuk dokumen rahasia pasukan" sebagai katarsis dari kepenatan dan pengapnya asap revolusi. Semua sudah menjadi "fosil"dalam kerangka kesadaran ke-Indonesia-an. Lenyap bersama surutnya ideologi kolonialisme dan imperialisme barat atas bangsa-bangsa timur. Sayangnya, perubahan tak selalu menggembirakan.

Wujud Indonesia dalam kesadaran kitapun menjadi lain. Dia,tak lagi berupa gugus-gugus yang mesti dipertahankan secara fisik dari pijakan penjajahan asing. Tak lagi berupa sebuah teritori kesadaran yang terancam karena ada helai-helai hegemoni menyelusup ke file-file kesadaran kita dan kemudian adalah virus yang dapat merobek sendi tulang, bahkan sumsum kebangsaan. Sebagai bangsa, Indonesia serta merta menjelma menjadi kerja keras membangun kehidupan ekonomi, menata kehidupan politik, menyaksikan perjalanan budaya : Sesuatu yang senantiasa mesti diberi legitimasi historis dari apa yang disebut sebagai "semangat juang '45" berdasarkan acuan tunggal bernama UUD 1945 yang dibingkai oleh kesadaran ber-Pancasila.

Dari sini akan timbul pertanyaan, apakah masih relevan mengedepankan aspek historis yang lahir dari kancah revolusi fisik tersebut untuk menjadi sumber motivasi dan inspirasi justru ditengah kecamuk keterbukaan dunia yang kian menyempitkan pilihan-pilihan kita untuk bisa tetap bertahan? Tentu tak semudah itu. mentransformasikan kesadaran era 45-an yang disemangati oleh api nasionalisme kepada kenyataan kontemporer yang berpijak pada bara modernisme, globalisme bahkan post modernisme. Pada gilirannya, modernisme pun "mengkhianati" nasionalisme 45-an itu dengan "putra bungsu" bernama Globalisme.

Bangsa inipun menjelma tidak sekedar sebuah "Nation" dengan negara sebagai perwujudan strukturnya : sesuatu yang kemudian memudahkan kita sebagai bangsa diatur dan dikendalikan semata-mata oleh negara, yang membawa kita membela dan mempertahankannya di tengah revolusi fisik. Saat ini, Pasar dan Media Massa menjelma menjadi "struktur" lain yang kemudian menggusur kokohnya "Nation" itu bahkan hingga sampai ke tingkat kesadaran. Bagaimana kiranya nasib "nasionalisme" (juga patriotisme) pada kenyataan ini? Logika pasar dan juga media massa jelas-jelas sangat berbeda dengan logika bangsa yang mengedepankan persatuan, keutuhan, kesatu paduan.

Era Globalisasi yang muncul menderu-deru, menjelma menjadi sebuah hegemoni baru, yang ternyata tidak lagi biadab seperti era Kolonialisme dan imperialisme, melainkan sangat "beradab" dan bekerja secara halus serta perlahan tapi pasti menggerogoti tulang sum-sum kebangsaan kita.

Gerakan Indonesia Unite yang merupakan semacam "tali pengikat" untuk mengakomodir kemarahan dan keprihatinan kolektif sejumlah orang yang memiliki ikatan di social media network pasca ledakan bom di Hotel JW Marriot dan Ritz Carlton tanggal 17 Juli 2009, kerapkali dianggap sebagai usaha spontan dan reaktif belaka.

Gerakan yang pada awalnya muncul di Microblogging Twitter (di media ini IndonesiaUnite pernah menduduki ranking pertama pada daftar trending topics atau topik yang paling banyak dibicarakan pengguna twitter di seluruh dunia) , lantas merambah ke Facebook, bagi saya tidak sekedar dimaknai sebagai sebuah kehebohan sesaat. Euforia yang "ditularkan" oleh IndonesiaUnite, sampai-sampai sejumlah orang dan pengguna social media network—secara patriotik— mengganti avatar atau head-shotnya dengan bendera merah putih, menjelma menjadi sebuah inspirasi. Sebuah upaya merevitalisasi makna Nasionalisme itu sendiri dalam sebuah gempita yang langsung maupun tidak, menyentuh titik kesadaran kita pada kebanggaan berbangsa, kebanggaan memiliki Indonesia.

Walau mungkin saja ada yang beranggapan bahwa euforia Nasionalisme pada #IndonesiaUnite terkesan berlebihan, genit, berisik dan dibuat-buat dengan membuat pernyataan bernuansa patriotis di deretan 140 karakter huruf pada media microblogging, gerakan ini sudah "menghimbau" kita untuk kembali pulang ditengah riuh globalisasi, menghayati kebhinekaan, merasakan Indonesia sebagai sebuah kesatuan yang koheren dan patut dibanggakan.

Saat menulis artikel ini, saya memutar lagu Iwan Fals dari koleksi MP3 saya. Sebuah lagu berjudul"Siang di Pelataran SD Kampung", yang membuat dada saya bergemuruh oleh rasa haru :

sentuhan angin waktu siang
kibarkan satu kain bendera usang
di halaman sekolah dasar
di tengah khidmat anak desa
nyanyikan lagu bangsa; bergemalah...
tegap engkau berdiri
walau tanpa alas kaki
lantang suara anak-anak
di sana kadar cinta mereka
tak terhitung besarnya
walau tak terucap
namun bisa kurasa; bergemalah...
ya, harapan tertanam
ya, tonggak bangsa
ternyata tak tenggelam
dengarlah nyanyi mereka, kawan
melengking nyaring menembus awan
lihatlah cinta bangsa di dadanya
(tak) peduli usang kain bendera

Ingatan saya mendadak terbang jauh ke dua puluhan tahun yang silam, ketika saya dan kawan-kawan Pasukan Pengibar Bendera (Paskibra) mencium bendera merah putih dengan tangis tertahan dan keharuan menyesak kalbu, pada malam sebelum kami bertugas mengibarkan bendera di Upacara peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia. Instruktur baris berbaris kami dengan suara lirih dan bergetar diiringi lagu "Syukur" mengisahkan kembali semangat perjuangan para pahlawan menegakkan kedaulatan bangsa ini.

Dan tanpa terasa air mata menetes perlahan melalui tebing pipi ketika saya mencium bendera merah putih itu dengan khidmat. Keharuan serupa yang kembali menyeruak ketika gerakan IndonesiaUnite itu digemakan secara lantang.

Tidak sebatas slogan namun juga sebuah tindakan untuk merawat, menyelamatkan dan membanggakan bangsa ini dengan segenap kemampuan yang kita punya, karena, seperti apa yang diungkapkan pada awal tulisan ini,""Tanah air adalah sebuah proyek yang kita tempuh bersama-sama, kau dan aku".

Dirgahayu Indonesiaku!
I Love you Full!

@politikana,-

Tabloid Komunitas menerima artikel, opini dan surat pembaca. Harap ditulis rapih, biar terbaca. Ditulis alamat lengkap, biar belajar tanggung jawab. Dan juga bila ada honornya, tidak salah kirim. Semua tulisan, wajib kami sunting agar sesuai dengan ciri khas Komunitas.

KOMUNITAS
Diterbitkan oleh CV Sarana Komunitas Creative

PEMIMPIN UMUM : Emboy Sumargana
PEMIMPIN REDAKSI : Oetjoe Gabriel Jauhar
PEMIMPIN PERUSAHAAN : A Peri
PENGACARA : Buhari, SH

Redaksi: Feri Supriyatna, Ibnu PS Megananda, Mulyadi, Saefullah.
Bagian Usaha: Ruslan
Design: Oetjoe.

Alamat Redaksi/Usaha: Komplek PU Tumaritis, Kp. Kedinding, Cipocok Jaya - Kota Serang, Banten. Telp. 0254.221730. email: komunitas_redaksi @yahoo.com.

Tarif Iklan: B/W Rp5.000/mmk, FC Rp15.000/mmk (depan), Rp12.500/mmk (belakang), FC Rp3.000.000 per 1/4 halaman (halaman dalam).

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Bukan Biaya Operasional Pendidik

"*Biar bapaknya supir angkot, anaknya bisa jadi pilot. Biar bapaknya loper koran, anaknya bisa jadi wartawan*", begitu kata Cut Mini dengan logat melayu dalam iklan sekolah gratis yang disiarkan diberbagai stasiun tv.

Tim Peliput

Gabriel Jauhar, Feri Supriyatna, Mulyadi





Ovinal rekan kami sesama wartawan me-pleset-kan iklan itu, biar bapaknya wartawan, anaknya bisa jadi loper koran. Atau Asep, biar bapaknya pejahat, anaknya bisa jadi pejabat. Plesetan ini tentu hanya candaan belaka. Hanya ungkapan tidak percaya terhadap iklan Cut Mini itu.

Apalagi iklan itu gencar disiarkan menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) dimana SBY turut serta sebagai capres incumben. Tudingan kampanye tak pelak dilekatkan. Kenyataan dilapangan, membuat masyarakat mencibir miring iklan sekolah gratis.

Tak satu pun orang tua murid yang ditemui mengatakan sekolah itu benar-benar gratis (baca box komentar orang tua). Pungutan tetap berjalan, dari dalih biaya investasi hingga biaya keperluan pribadi siswa, seperti seragam dan buku pelajaran.

Lucunya, Bambang Sudibyo, Menteri Pendidikan Nasional tanpa malu-malu berdalih soal pengertian gratis. Dalam pidatonya saat meresmikan sekolah gratis di Sumatera Selatan mengatakan, "Pengertian gratis antar daerah bisa berbeda (tempointeraktif.com, 25/3)".

Bahkan Sudibyo mendorong sekolah melakukan pungutan dengan bentuk sumbangan. "Sekolah yang bagus adalah sekolah yang bisa mengumpulkan sumbangan dari komite sekolahnya (tempointeraktif)". Tak lupa Sudibyo mendalihkan, yang haram adalah pungutan, sumbangan tidak.

Tak pelak tumbuh ribuan jenis sumbangan di sekolah, mulai dari sumbangan pembangunan, sumbangan pendidikan, sumbangan baju sekolah, sumbangan perpisahan, sumbangan study tour, sumbangan pramuka, sumbangan PMR hingga sumbangan doa bagi mereka yang tidak mampu bayar sumbangan.

Padahal biaya yang dikeluarkan pemerintah untuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tidaklah sedikit. Provinsi Banten saja mendapatkan jatah tahun 2007 sebesar Rp587,78 miliar. Kurang lebih seperempat APBD Banten yang bekisar Rp2 triliuan-an.

"Icip-icip"

Besarnya dana BOS ini, membuat banyak orang jadi pinter keblinger. Pemerintah pusat membuat aturan tanpa melihat kondisi dilapangan. Pemerintah provinsi tergagap-gagap mencairkan dana BOS. BOS pun cair tak tepat waktu (baca temuan BPK)

Di kabupaten/kota muncul tim-tim siluman, meminta upah perbantuan, mulai dari membantu membuatkan administrasi hingga membantu dirinya tutup mulut. Ada juga yang menjadi koordinator pembayaran item tertentu di dalam BOS. Semuanya tergiur ingin "icip-icip (menikmati)" kue dana BOS.

"Sekolah ini sudah gratis kang. Pendapatannya hanya dari dana BOS. Sekolah juga punya tamu, perlu dikasih jamuan. Apalagi kalau yang datang LSM atau wartawan. Kalau belum diongkosin, belum mau pulang. Masa saya harus mengeluarkan dari uang gaji saya?," ujar salah kepala sekolah yang memohon untuk tidak mencantumkan namanya. Alasannya, hanya mengundang tamu-tamu itu kembali.

Kabar tak sedap tersiar di Kabupaten Lebak, Ustadz Surohman mengaku dana BOS-nya dipotong 30 persen oleh oknum Kelompok Kerja Pengawas (Pokjawas) Departemen Agama (Depag) Lebak. Kabar ini dibantah Pokjawas dengan dalih uang yang diterimanya itu upah perbantuan untuk kelancaran pembinaan dan laporan ke dinas.

Tinggal kepala sekolah dan guru jadi mumet belenger (benar-benar bingung). Saat kuliah dulu, mereka tak mendapatkan mata kuliah administrasi keuangan dan lobi birokrasi, apalagi menghadapi tata cara menghadapi pengawas resmi dan tak resmi, kini harus mereka jalani.

Bingung bagaimana menutupi pengeluaran diluar 14 item itu. Akhirnya transport/insentif jadi sasaran empuk, pengeluaran yang buktinya hanya tanda tangan penerima saja. Akibatnya, anggaran transport/insentif tiap sekolah berlomba-lomba menjadi yang terbesar.

Maka tak aneh jika temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyebutkan, penyimpangan terbesar dana BOS di Kabupaten Serang berasal dari pos transport/insentif guru, kepala atau komite sekolah sebesar Rp976,33 juta. Jauh meninggalkan posisi kedua, pembelian alat elektronik yang cuma Rp139,06 juta.

Tak aneh juga dari uji petik BPK dapat disimpulkan 88,25 persen sekolah menyimpang dalam menggunakan BOS. Jika dihitung dari nilai BOS, sekitar Rp21,6 persen dana BOS digunakan tidak sesuai panduan.

"Intelektual Icip-icip"

Dari temuan BPK, ada yang tidak dibahas lebih lanjut, soal proses pencairan dana BOS dari Pos Giro ke rekening sekolah. Dana BOS sekitar Rp105 miliar per triwulan mengendap di suatu tempat di Pos Giro selama 2 hingga 8 hari.

Pengendapan ini akibat tidak adanya perintah dari Tim Manajemen BOS Banten untuk dipindahkan ke rekening sekolah. Sengajakah? Dengan asumsi jasa bunga bank 12 persen per tahun, dana itu menghasilkan jasa bunga sekitar Rp26 juta per triwulan atau Rp104 juta per tahun. Jumlah yang lumayan sebagai penghasilan tambahan.

Prameswari, teman yang biasa main Forex (perdagangan indeks saham) mengatakan, uang sebesar Rp105 miliar jika diinvestasikan dalam Forex selama 2-8 hari, dijamin dapat menghasilkan pendapatan Rp5-Rp10 miliar. Uang Rp105 miliar itu pun dijamin aman dan dapat ditarik tepat waktu Dapat dibayangkan berapa uang yang dihasilkan setahunnya?

Jadi dimanakah uang itu mengendap? Wallahualam.

Shock Therapy

BPK mengungkapkan, 88,2 persen sekolah menyimpang dalam penggunaan BOS.

Angka ini mengindikasikan 2 hal, pertama kurangnya sosialisasi pengunaan dana BOS ke sekolah. Atau moral para pendidik ditingkat satuan pendidikan sudah demikian parah?

Muhammad Fitriyadi, Sekretaris II Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi (GNPK) Koordinator Banten merasa prihatin melihat angka presentasi itu.

"Terlepas dari kurang tidaknya sosialisasi penggunaan dana BOS, sekolah harus diberi shock therapy. Terapi kejut, biar tidak terulang," kata Fitriyadi.

Shock therapy itu berupa keharusan pengembalian dana BOS yang digunakan oleh yang tidak berhak.

"kalau itu dipakai insentif guru, masing-masing guru yang nerima insentif harus mengembalikan. Kalau dana itu digunakan untuk suap pengawas, LSM atau wartawan, kepala sekolah yang harus kembalikan," ujarnya. (***g***)



Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Bak Lolongan Serigala Nun Jauh Di Hutan Rimba

Biar menakutkan, lolongan serigala yang terdengar sayup-sayup tidak membuat orang menjadi merubah kebiasaannya. Mereka hanya tertegun sebentar, bergidik, lalu melanjutkan aktifitasnya seperti biasa.

Oleh : **Gabriel Jauhar**

Mungkin perumpamaan itu cocok untuk menggambarkan reaksi pengelola dunia pendidikan di Banten dalam memandang Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Dana Pendidikan lainnya.

Pengelola dana BOS, mulai dari tingkat provinsi hingga sekolah, tertegun sebentar. Mendadak banyak sekolah memasang spanduk bertuliskan penerima BOS, tak lebih. Padahal dari 119 sekolah yang diperiksa BPK, 105 sekolah (88,2 persen) melakukan penyimpangan.

Rp105 M Mengendap Dulu

Tim manajemen BOS Provinsi Banten yang bertanggung jawab penuh atas pengalokasian BOS 2007 sebesar Rp422,59 miliar, BOS Buku 2007 Rp33,78 miliar dan BOS semester I 2008 Rp214,89 miliar, disebut oleh BPK belum bersinerji dengan dinas pendidikan di kabupaten dan kota.

Selain itu, pengawasan fungsional dan pengawasan berjenjang belum dilaksanakan secara optimal. Akibatnya, BPK masih menemukan penggunaan BOS ditingkat sekolah tidak sesuai dengan ketentuan.

Perencanaan pengalokasian dana BOS di Banten dinilai BPK memiliki kelemahan yang dapat menyebabkan terjadinya kelebihan dan kekurangan alokasi BOS di beberapa sekolah. Sistem pengalokasian yang digunakan manajemen BOS Banten tidak dapat mendeteksi adanya penggelembungan siswa dan terjadinya mutasi siswa di semester berikutnya.

Prosedur penyaluran BOS Banten selalu terlambat. Dana BOS yang seharusnya diterima sekolah di awal bulan pertama setiap triwulan, ternyata tidak pernah tepat. Triwulan I 2007 seharusnya diterima awal Januari, malah diterima awal Maret. Triwulan II diterima akhir April, triwulan III diterima pertengahan Agustus dan triwulan IV awal Nopember. Sedangkan dana BOS 2008 triwulan I baru diterima pertengahan Maret dan triwulan II diterima akhir April.

Keterlambatan penyaluran ini disebabkan lambatnya proses birokrasi Pemerintah Provinsi Banten. Gubernur Banten baru menetapkan Tim Manajemen BOS Provinsi Banten 2008 tanggal 14 Februari 2008. Akibatnya, kerjasama penyaluran BOS dengan PT POS Indonesia baru dilaksanakan tanggal 26 Februari 2008.

Belum lambatnya proses administrasi keuangan yang memakan waktu 2 hingga 11 hari. Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) ke Bendaharawan memakan waktu 1 hingga 7 hari. Tidak dijelaskan dalam LHP BPK, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM). Terhitung sejak SPM masuk ke KPPN hingga terbit Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), memakan waktu 1 hingga 4 hari.

Setelah dana BOS cair ke PT POS, Manajemen BOS Banten tidak segera memerintahkan PT POS untuk memasukan dana itu ke rekening sekolah. Pengendapan ini memakan waktu 2 hingga 8 hari. Setiap triwulan, dana BOS diperkirakan sekitar Rp105 miliar.

Menurut LHP BPK, salah satu penyebab keterlambatan administrasi keuangan ini adalah tidak ada sanksi yang jelas bagi lembaga penyalur dana BOS.

Di sisi lain, LHP BPK juga mengungkapkan tidak pedulinya Pemerintah Provinsi Banten terhadap dunia pendidikan, khususnya penyelenggaraan pendidikan dasar. Tertulis di LHP BPK, Pemerintah Provinsi Banten tidak mengalokasikan dana pendamping dari APBD Banten tahun 2007 dan 2008 dalam bentuk Biaya Operasional Pendidikan (BOP).

Rp1,34 M Salah Belanja?

Pemeriksaan penggunaan dana BOS ditingkat kabupaten/kota terbagi 2 bagian. Pertama pemeriksaan di Tim Manajemen BOS kabupaten/kota dan kedua, ditingkat satuan pendidikan, yaitu sekolah.

Sama seperti Tim Manajemen BOS Banten, Tim Manajemen BOS Kabupaten Serang pun dinilai belum bersinerji dengan lembaga lain yang menangani BOS dan tidak optimal dalam melakukan pengawasan fungsional dan pengawasan berjenjang.

Ditingkat sekolah, BPK melakukan uji petik penggunaan dana BOS di 48 sekolah di Kabupaten Serang. Hasilnya, 38 sekolah (79,1%) menggunakan dana BOS tidak sesuai dengan ketentuan dan hanya 2 sekolah yang mempublikasikan penggunaan dana BOS di papan pengumuman sekolah.

Jumlah dana BOS yang digunakan 48 sekolah itu sebesar Rp6,19 miliar. Sebanyak Rp1,34 miliar atau 21,6 persen menyimpang. Penyimpangan itu terdiri dari Rp32,81 juta digunakan untuk rehab sedang/berat oleh 3 sekolah, Rp95,3 juta dibelanjakan komputer oleh 21 sekolah, Rp139,06 juta alat-alat elektronik seperti TV, antena parabola oleh 20 sekolah, 8 sekolah menggunakannya untuk biaya Study Tour dan perpisahan kelas IV sebesar Rp18,6 juta.

Sebesar Rp976,33 juta dibagi-bagi ke guru, kepala sekolah dan dewan komite dengan istilah transport di 38 sekolah, 12 sekolah malah menggunakan dana BOS untuk menyumbang LSM dan memasang iklan sebesar Rp10,06 juta dan SD Al-Azhar Serang menyumbangkan dana BOS untuk yayasannya Rp73,76.

Indikasi kuat korupsi dilakukan SMP 5 Serang sebesar Rp1,08 juta. Bukti belanja jamuan makan berupa pembelian nasi bungkus, hanya nota toko. Lucunya, nota itu berstempel toko material.

Dari 38 sekolah yang menyimpang itu sebesar Rp1,34 miliar, SMPN 5 Kota Serang, ternyata menempati ranking pertama dalam penyimpangan sebesar Rp146,0 juta. Diikuti sekolah yang dikenal tempat anak-anak orang kaya, SMP Al Azhar sebesar Rp120,1 juta dan ranking ketiga, SD Al Azhar Rp84,8 juta.

Sedangkan kelompok penyimpangan terbesar adalah dibagikan ke guru, kepala sekolah dan dewan komite sebesar Rp976,33 juta, lalu belanja elektronik Rp95,32 juta dan rehab sekolah Rp32,81 juta.

Gelembungkan Siswa

Rupanya rasa acuh tak acuh terhadap pelaksanaan BOS di Banten sudah merata, BPK pun menilai Tim Manajemen BOS Kabupaten Lebak belum bersinerji dengan lembaga lain yang menangani BOS dan tidak optimal dalam melakukan pengawasan fungsional dan pengawasan berjenjang.

LHP BPK menyebutkan, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pendidikan di Kabupaten Lebak tidak mengetahui jenis dan sumber dana bantuan yang diterima sekolah. Bahkan kepastian bantuan itu, UPT Pendidikan tidak mengetahui dengan pasti!

Padahal UPT Pendidikan merupakan kepanjangan tangan

Dana BOS Lebak Tanpa Bukti Yang Sah

SMPN 2	Maja	24.794.000
SMPN 3	Cipanas	4.508.000
SDN 1	Bintangsari	34.114.500
SDN 1	Sangiang Tanjungj	44.890.280
SDN 1	Hegarmanah	1.644.500
SDN 1	Ciparahu	2.571.000
SDN 2	Cijoro Pasir	4.600.000
SDN 4	Malingping Utara	2.500.000
SDN 1	Kujangsari	6.876.400
SDN 1	Lebak Peundeuy	7.918.400
SDN 4	Sindangratu	1.973.000
SMPN 1	Cileles	63.030.500
SDN 3	Kolelet Wetan	150.000,00
SDN 1	Mekarsari, Maja	88.462.000
SDN 2	Pasar Keong	5.272.850
SDN 1	Margaluyu	124.962.425
SDN 2	Cibuah	11.112.500
SDN 3	Cipedang	42.819.500
SMPN 2	Cibadak	14.500.000
SMPN 1	Cimarga	37.870.000
SMPN 2	Bayah	38.829.000
SDN 2	Muara Wanasalam	10.142.000
SDN 2	Kaduagung timur	32.869.650
SDN 2	Binong	45.042.400
SDN 2	Inten Jaya	29.558.900
SDN 1	Tanjungsari	55.109.000
SDN 3	Darmasari	10.555.000
SDN 1	Situmulya	2.291.000
SDN 2	Sukajadi	61.455.000
SDN 2	Karangkamulyan	18.803.900
SDN 3	Malingping Selatan	22.495.000
SDN 1	Cipeundeuy	1.400.000
SMPN 1	Maja	49.495.250
SMPT	Mulia Hati Insani	380.000
SMP	Nurul Madaany	26.858.100
SMP	La Tansa	54.559.000
	Jumlah	**984.413.055**



SDN 3 Kota Serang

Saprudin

"Belum pernah menyimpang dari penggunaan dana BOS"

Catatan BPK: peralatan komputer Rp790 ribu, peralatan elektronik Rp785 ribu dan transport/insentif Rp60,6 juta.



SDN Neglasari Serang

Titi Rodiah

"Belum pernah menyimpang. Kalau menyimpang, sudah dimana kali, pak"



SDN Neglasari Serang

Nunung

"Kesalahan pemberian insentif, kurangnya sosialisasi BOS dari konsultan. Konsultan sendiri tak bisa jelaskan temuan BPK"

Catatan BPK: transport/insentif guru, kepala sekolah atau komite sekolah sebesar Rp3,9 juta.



Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak yang mempunyai tanggung jawab melakukan monitoring dan pengawasan pelaksanaan bantuan pendidikan.

Akibatnya, BPK banyak menemukan pengeluaran-pengeluaran dana BOS yang tidak didukung oleh bukti pengeluaran yang sah. Dari 71 sekolah yang diperiksa BPK, 67 sekolah (94,35 persen) melakukan penyimpangan penggunaan dana BOS.

Sebanyak Rp1,16 miliar dana BOS di sekolah itu digunakan untuk kegiatan yang tidak ada kaitannya dengan siswa. Pengeluaran itu meliputi pembelian meubelair dan alat elektronik di ruang guru/kepala sekolah, pengeluaran rutin yang tidak seharusnya memerlukan pembiayaan, peringatan HUT RI, iuran rutin PGRI, perpisahan guru pensiun, duplikasi dana pendidikan lainnya. Termasuk di dalamnya ada sumbangan untuk perbaikan kantor cabang dinas dan rehab sekolah yang dilakukan terus menerus.

Selain itu, pengeluaran dana BOS sebesar Rp984,4 juta di 36 sekolah, ternyata tidak didukung oleh bukti pengeluaran yang sah. Antara lain tidak ada faktur pembelian, dan tidak ada tandatangan penerima.

Pelanggaran

Menurut LHP BPK, penyimpangan penggunaan dana BOS di Banten telah melanggar:

1. Panduan BOS BAB IV Mekanisme Pelaksanaan Point B Penyaluran dan Pengembalian.
2. Panduan BOS Bagian I Petunjuk Pelaksanaan BOS butir C.1, butir dan C.2.
3. Panduan BOS tentang pengelolaan dana BOS dikelola secara bertanggung jawab dan transparan.
4. Pedoman Penyaluran BOS dan BOS Buku, "kewajiban untuk membeli buku teks pelajaran yang diprioritaskan untuk digunakan dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah dan digunakan minimal selama 5 tahun".
5. Pedoman Penyaluran BOS dan BOS Buku Bab III Mekanisme Pelaksanaan huruf C.
6. Panduan Penyaluran BOS Bagian III Petunjuk Teknis Keuangan BOS butir II.A.4, butir III.C.4 dan butir III.C.6.
7. Petunjuk Pelaksanaan BOS untuk Penyediaan Buku Teks Pelajaran BAB I huruf B, BAB II huruf B dan BAB III huruf C No 4. (***g***)

BOS Serang Menyimpang (Rp. Juta)

	Rehab	Komp	Elek	Studi	Insentif	Iklan	Organisasi	Jumlah
SMPN 1 Serang	16,6	2,4	-	-	4,3	-	-	23,4
SMPN 5 Serang	-	2,2	65,0	–	73,8	4,9	-	146,0
SMPN 7 Serang	-	2,5	2,6	–	54,6	1,2	-	60,9
SMPN 1 Cipocok	4,8	2,5	3,0	–	43,1	0,5	-	53,9
SMPN 1 Kasemen	-	-	-	-	49,2	-	-	49,2
SMPN 2 Kasemen	–	0,0	0,7	–	30,1	1,1	-	32,0
SMPN 1 Walantaka	-	-	0,2	–	31,5	-	-	31,7
SMPN 1 Gunungsari	-	-	-	-	57,5	-	-	57,5
SMPN 2 Mancak	-	-	-	-	2,8	0,1	-	2,9
SMPN 2 Ciruas	-	-	-	-	66,7	-	-	66,7
SMPN 2 Cikeusal	–	0,8	3,1	–	34,3	-	-	38,3
SMPN 1 Jawilan	-	9,1	1,9	–	65,8	-	-	76,9
SMPN 3 Cikande	-	4,7	-	-	23,0	-	-	27,7
SMPN 1 Cinangka	-	23,7	3,8	–	21,6	0,2	-	49,4
SMPN 1 Pontang	-	-	6,4	–	4,2	0,1	-	10,7
SMPN 2 Pontang	–	0,4	0,2	–	4,6	0,3	-	5,6
SMPLB Serang	-	-	-	-	6,1	-	-	6,1
SMP Al Azhar	-	27,8	27,0	6,5	58,8	-	-	120,1
SDN 2 Serang	-	1,4	-	-	45,6	-	-	47,0
SDN 3 Serang	–	0,7	0,7	–	60,6	0,0	-	62,2
SDN Walantaka 1	–	0,8	-	-	15,8	0,1	-	16,8
SD Al Azhar	-	79,1	–	2,1	-	1,0	73,7	84,8
SDN Margasana	11,3	–	4,0	0,1	7,7	0,2	-	23,6
SDN Cipinang	–	0,7	–	3,7	8,1	-	-	12,5
SDN Kelanggaran	–	0,2	-	-	1,6	-	-	1,8
SDN Cileungsir	–	0,7	2,9	0,6	20,8	-	-	25,2
SDN Cirangkong 1	-	2,0	-	-	10,9	-	-	12,9
SDN Margaluyu	–	0,5	0,9	0,5	7,3	-	-	9,3
SDN Pancur Taktakn	-	3,6	2,6	–	12,7	-	-	18,9
SDN Banjar Agung 2	-	-	1,7	–	10,7	-	-	12,4
SDN Banjar Agung 3	-	-	-	-	7,4	-	-	7,4
SDN Kertasana	-	-	1,3	–	18,1	-	-	19,5
SDN Garung	-	-	6,8	2,5	22,0	-	-	31,4
SDN Pancur Ciomas	-	-	3,4	–	22,3	-	-	25,8
SDN Banjarsari 2	-	-	-	2,5	29,7	-	-	32,2
SDN Neglasari	-	-	-	-	3,9	-	-	3,9
SDN Ujungtebu	-	-	-	-	20,9	-	-	20,9
SDLBN Serang	-	-	-	-	6,0	-	-	6,0
SDN Nagreg	-	-	-	-	10,3	-	-	10,3
						Jumlah		**1.345,9**

BOS Menyimpang Di Kab Lebak

SMPN 1	Cibadak	119.379.800
SMPN 2	Maja	59.686.600
SMPN 3	Cipanas	660.000
SDN 1	Bintangsari	3.212.500
SDN 1	Sangiang Tanjung	9.383.400
SDN 1	Bayah Barat	1.450.000
SDN 1	Hegarmanah	2.330.800
SDN 1	Ciparahu	13.441.000
SDN 4	Ciparahu	1.148.000
SDN 1	Kadujajar	4.950.000
SDN 2	Kadujajar	4.391.300
SDN 2	Cijoro Pasir	5.770.100
SDN 2	Asem	5.498.400
SDN 1	Panancangan	5.094.500
SDN 1	Ciburuy	12.740.000
SDN 2	Curug Badak	8.569.000
SDN 2	Kujang Jaya	350.000
SDN 1	Sindang Ratu	1.230.000
SDN 1	Citepuseun	4.072.700
SDN 4	Malingping Utara	9.956.150
SDN 3	Cipeundeuy 3	24.519.500
SMPN 3	Rangkasbitung	9.871.000
SDN 1	Kujangsari	11.234.800
SDN 1	Lebak Peundeuy	7.044.400
SDN 4	Sindangratu	2.339.000
SMPN 1	Cileles	23.631.500
SDN 3	Kolelet Wetan	15.690.000
SDN 1	Mekarsari, Maja	27.419.500
SDN 2	Pasar Keong	14.483.900
SDN 1	Margaluyu	35.707.000
SDN 2	Cibuah	17.557.500
SDN 3	Cipedang	6.450.500
SDN 10	Muara Ciujung Tmr	30.731.500
SDN 2	Pasirkupa	49.989.000
SDN 1	Girilaya	6.300.000
SDN 1	Cilangkap	9.356.000
SDN 4	Darmasari	14.012.500
SDN 2	Kujangsari	14.807.000
SDN 1	Jatake	5 .786.000
SDN 3	Jatake	4.241.500
SDN 3	Muara	15.962.863
SDN 1	Mekarsari,Cihara	13.164.100
SMPN 2	Cileles	32.363.000
SMPN 1	Wanasalam	20.279.000
SMPN 4	Warung Gunung	11.594.000
SDN 2	Muara Wanasalam	43.522.150
SDN 2	Mekar Jaya	1.950.000
SDN 3	Cikotok	1.835.000
SMPN 2	Cibadak	40.693.000
SMPN 1	Cimarga	17.460.750
SMPN 2	Bayah	8.915.000
SDN 2	Cihara	2.395.000
SDN 2	Kaduagung Timur	37.344.850
SDN 2	Binong	3.410.000
SDN 1	Tanjung sari	30.825.000
SDN 2	Inten Jaya	25.365.400
SDN 3	Darmasari	10.014.300
SDN 1	Situmulya	11.742.100
SDN 2	Sukajadi	17.533.072
SDN 2	Karangkamulyan	33.704.700
SDN 3	Malingping Selatan	34.629.000
SDN 1	Cipendeuy	8.854.000
SMPN 1	Maja	88.241.150
SMPT	Mulia Hati Insani	5.861.000
SMP	Nurul Madaany	4.550.000
SMP	Terpadu Al Qudwah	200.000
SMP	La Tansa	34.240.800
	Jumlah	**1.161.135.585**

Mulyadi, Tim Manajemen BOS Provinsi

“Itu Sebenarnya Masalah Teknis Birokrasi”

Oleh
Gabriel Jauhar, Mulyadi



Sudah menjadi pemandangan yang biasa, setiap gedung milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), selalu dijaga oleh petugas keamanan non Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Demikian juga dengan gedung Dinas Pendidikan (Dindik) Provinsi Banten, di pintu utama gedung, 2 satpam duduk berjaga-jaga. Menahan orang yang hendak masuk, menanyakan tujuannya, berkonsultasi dengan orang yang ada di dalam gedung dan memberitahukan boleh atau tidaknya orang itu masuk gedung.

Setelah berkomunikasi ke dalam gedung (entah dengan siapa), satpam dengan senyum yang ramah memberitahukan Komunitas dapat meminta informasi seputar pelaksanaan Biaya Operasional Sekolah (BOS) ke Mulyadi. Diantarnya kami ke lantai paling atas.

Ruangan itu tidak seberapa luas, tak ada hiasan dinding, lemari arsip dan beberapa meja. Meja-meja itu menunjukan tidak terpakai, bersih dan tak ada berkas. Dipojok dengan pintu masuk, Mulyadi duduk menghadap laptop dan setumpuk dokumen. Jaket dipakai rapat-rapat. Wajahnya menunjukan rasa kedinginan.

Komunitas : Sebenarnya ada berapa BOS?

Mulyadi : Sebenarnya hanya ada satu BOS, tapi untuk tahun 2008, pemerintah juga mengeluarkan bantuan untuk pengadaan buku sekolah. Itu juga disebut BOS. Untuk membedakannya, maka disebut BOS Buku. Sedangkan BOS disebut BOS reguler. Sekarang hanya ada BOS. Bantuan buku sudah dimasukan dalam salah satu item BOS.

Komunitas : Nilai BOS?

Mulyadi : Tahun 2008, tingkat SD sebesar Rp254 ribu per siswa per tahun dan tingkat SMP Rp354 ribu per siswa per tahun. Sedangkan tahun 2009 dibagi menjadi BOS Kabupaten dan BOS Kota. Kabupaten SD Rp397 ribu dan SMP Rp570 ribu. Kota SD Rp400 ribu dan SMP Rp575 ribu.

Komunitas : Bagaimana teknis bantuan buku?

Mulyadi : Bantuan buku masuk dalam salah satu item di BOS 2009. Konsepnya satu siswa mendapatkan satu buku untuk satu tahun pelajaran. Menurut Panduan BOS, buku yang dibeli tahun ini untuk kelas 1-6 adalah PKn, untuk kelas 4-6 adalah IPS, untuk 7-9 adalah PKn dan kelas 7-9 adalah IPA.

Komunitas : Buku itu milik siapa?

Mulyadi : Buku itu milik sekolah, tapi wajib dipinjamkan ke murid. Akhir tahun pelajaran, murid wajib mengembalikan buku itu ke sekolah, sehingga bisa digunakan untuk adik kelasnya.

Komunitas : Bagaimana jika buku pelajaran itu berubah tahun depan?

Mulyadi : Kalau ada perubahan kurikulum, biasanya diikuti dengan perubahan buku pelajaran. Tapi pemerintah sudah menetapkan buku-buku acuan selama 5 tahun ke depan.

Buku-buku itu sudah dibeli hak ciptanya oleh pemerintah, sehingga sekolah pun diharuskan membeli buku yang masuk dalam daftar buku acuan.

Komunitas : Kapan sekolah belanja buku pelajaran?

Mulyadi : Saat ini, sekolah seharusnya sudah membeli buku pelajaran itu.

Komunitas : Apa betul sudah dapat membiayai operasional sekolah?

Mulyadi : Kalau melihat 14 item itu (baca box: 14 Item BOS 2009), kami rasa semua kebutuhan operasional sekolah sudah tercukupi. Apalagi sudah dikatakan, pemerintah daerah juga wajib membantu kekurangan pelaksanaan pendidikan di daerahnya.

Di sisi lain, keperluan kelas baru, rehabilitasi kelas dan peningkatan mutu pendidikan didanai oleh Dana Alokasi Khusus (DAK) atau Dana Alokasi Umum (DAU). Belum bantuan dari pemerintah daerah masing-masing.

Komunitas : Jadi SD dan SMP gratis?

Mulyadi : Seluruh SD dan SMP negeri sekarang wajib menggratiskan sekolahnya. Sekolah negeri wajib menerima BOS, jika tidak, tetap tidak boleh memungut biaya. Sedangkan sekolah swasta yang tidak dikembangkan bertaraf internasional atau berbasis keunggulan lokal, wajib menerima BOS. Ya jadi wajib gratis. Jika ada sekolah yang menolak BOS, sekolah tetap harus gratis.

Komunitas : Bagaimana dengan sumbangan?

Mulyadi : Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan (UU BHP) memperbolehkan sekolah menerima sumbangan. Tapi ingat, sumbangan itu sifatnya sukarela. Artinya, besaran tidak boleh ditentukan dan waktunya tidak mengikat.

Komunitas : Bagaimana cara menetapkan quota BOS masing-masing sekolah?

Mulyadi : Pertama ada quota dari pemerintah pusat dulu. Lalu usulan jumlah siswa masing-masing sekolah ke Kabupaten/kota. Kabupaten/kota mengeluarkan usulan SK alokasi penerima dan diverifikasi oleh Provinsi. Setelah verifikasi, provinsi mengeluarkan SK Alokasi Penerima BOS per 6 bulan.

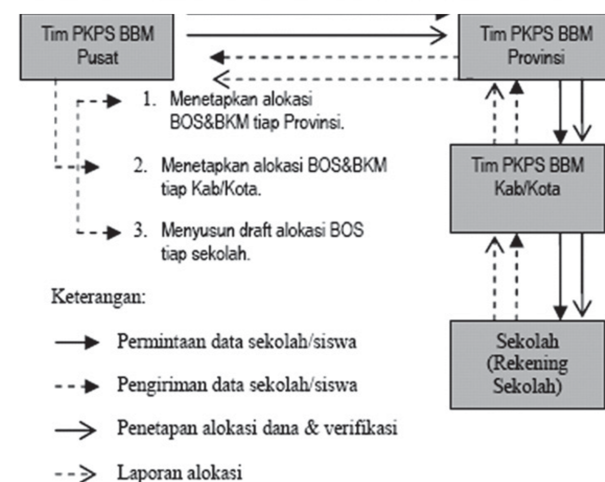
Komunitas : Kalau quota dari pemerintah pusat terlebih dahulu, ada kemungkinan tidak semua siswa tercover dana BOS?

Mulyadi : Bisa saja terjadi, tapi hingga saat ini tidak pernah terjadi. Data jumlah siswa lengkap hingga pemerintah pusat. Kenaikan jumlah siswa bisa diperkirakan berdasarkan Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK).

Komunitas : Sekolah menerima dana BOS dari provinsi?

Mulyadi : Oh tidak. Setelah SK alokasi itu disahkan, tim manajemen BOS provinsi mengajukan Surat Perintah Pembayaran (SPP) ke Dinas Pendidikan. Dinas Pendidikan mengeluarkan Surat Perintah

Mekanisme Alokasi Dana BOS















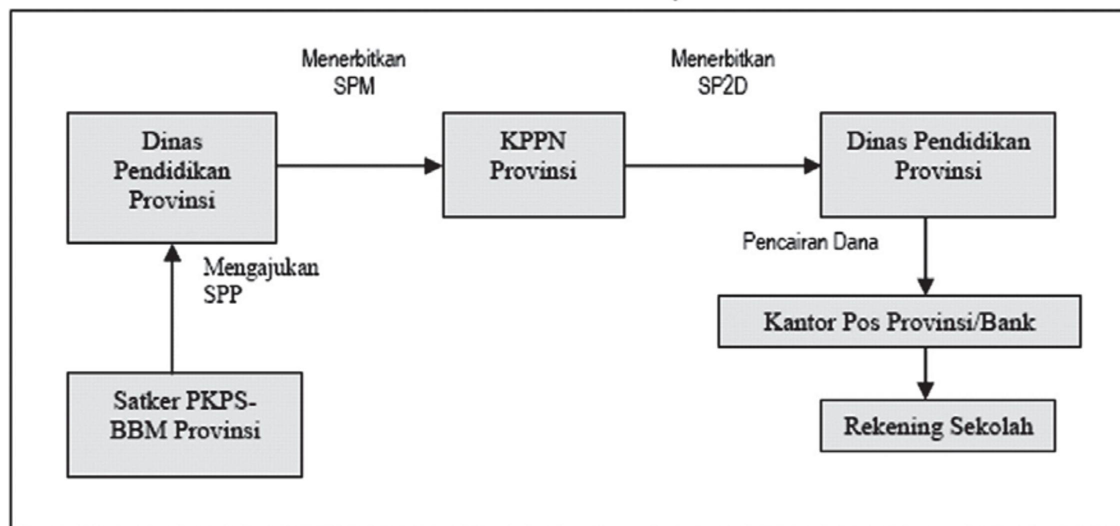








Mekanisme Pencairan dan Penyaluran Dana BOS



Membayar (SPM) ke KPPN. Dari KPPN inilah keluar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) ke lembaga penyalur BOS. Di Banten menggunakan PT Pos dan Giro. Dari Pos Giro langsung dimasukkan ke rekening sekolah.

Komunitas : Apakah dana BOS cair setiap 6 bulan?

Mulyadi : Tidak, dana BOS dicairkan setiap 3 bulan sekali di awal bulan pertama.

Komunitas : Faktanya pencairan BOS 2008 selalu tidak tepat waktu?

Mulyadi : Itu sebenarnya masalah teknis birokrasi. Anggaran sendiri baru disahkan sekitar bulan Maret. Belum pengurusan SK Tim Manajemen BOS dan waktu yang diperlukan ketika pencairan, mulai dari pembuatan SPP hingga SP2D.

Komunitas : Jadi tahun 2009 dan mungkin juga tahun 2010?

Mulyadi : 2009 memang terulang. 2010 bisa tidak terulang jika ada terobosan birokrasi.

Komunitas : Penggunaan BOS 2008 ditemukan banyak yang menyimpang. Apa tindakan Tim Manajemen BOS provinsi?

Mulyadi : Masalah teknis pelaksanaan di lapangan merupakan kewenangan kabupaten/kota. Monitoring dan Evaluasi tingkat provinsi lebih pada fungsi supervisi. Monitoring ke lapangan dilakukan setiap bulan Juli. Hanya 1 x setiap tahun, sesuai dengan anggaran yang tersedia. Monitoring ini juga sekaligus pengumpulan data.

Hasil monitoring dan evaluasi hanya dijadikan nilai kinerja penggunaan BOS. Misalnya, tahun ini pelaksanaan BOS masih menyimpang atau tidak.

Komunitas : Kalau ditemukan ada yang menyimpang atau ada yang melaporkan penggunaan dana BOS menyimpang?

Mulyadi : Karena kewenangan kami hanya supervisi, kami hanya mengirim surat klarifikasi ke kabupaten/kota. Kabupaten/kota yang akan menindaklanjuti temuan itu.

Komunitas : Apakah itu efektif?

Mulyadi : Sejauh ini kami rasa efektif. Contohnya, kami menemukan adanya dugaan penggelembungan jumlah siswa. Kami melayangkan surat klarifikasi ke kabupaten/kota. Ternyata bukan penggelembungan, tapi ada SMP yang belum mempunyai izin operasional, sehingga harus menginduk pada SMP lain.

Atau tentang SD Ciputat yang masih melakukan pungutan sebesar Rp500 ribu. Alhamdulillah, setelah dilayangkan surat klarifikasi, pungutan tersebut dikembalikan.

Komunitas : Apakah dana BOS dapat digunakan untuk pembuatan web sekolah atau koneksi internet sekolah?

Mulyadi : Sebenarnya bukan kewenangan saya. Kalau lihat 14 item BOS, tidak ada kalimat yang memperbolehkan dana BOS digunakan untuk pembuatan web atau koneksi internet. Mungkin bisa masuk ke pembiayaan daya dan jasa, yaitu listrik, air dan telepon.

Cuma tidak ada penjelasan lebih lanjut. Apakah telepon itu termasuk pada pembuatan web atau koneksi internet? Kalau pun ada pembuatan web, rasanya lebih cocok untuk tingkat SMA.

Komunitas : Jadi boleh digunakan untuk pembuatan web atau koneksi internet?

Mulyadi : Itu bukan kewenangan saya.

Tiba-tiba Mulyadi mengatakan, dirinya belum makan siang, sedangkan waktu makan siang sudah lewat 2 jam lalu. Sambil makan siang yang terlambat itu, obrolan tentang BOS berlanjut. Sayangnya, obrolan itu lebih bersifat pribadi.

Dari obrolan itu kami mengetahui Mulyadi bukanlah PNS di Dinas Pendidikan Provinsi Banten, tapi pihak ketiga. Mulyadi hanya mengatakan staf ahli soal BOS di Dinas Pendidikan Banten.

Aneh, permintaan keterangan ke Dindik Banten, ternyata diberikan secara resmi oleh pegawai yang tidak resmi (baca bukan PNS Dindik Banten). (***g***)



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN HASIL PEMERIKSA

ATAS
PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DA
DANA PENDIDIKAN DASAR LAINNYA
(APBN DAN APBD)
TA 2007 DAN 2008 (SEMESTER I)
PADA PROVINSI BANTEN
DI
SERANG

BPK RI PERWAKILAN PROVINSI BANTEN

Nomor : 03/LHP/XVIII.SRG/01/2009
Tanggal : 23 Januari 2009

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN

ATAS
PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAN
DANA PENDIDIKAN DASAR LAINNYA
(APBN DAN APBD)
TA 2007 DAN 2008 (SEMESTER I)
PADA KABUPATEN LEBAK
DI
RANGKASBITUNG

BPK RI PERWAKILAN PROVINSI BANTEN

: 04/LHP/XVIII.SRG/01/2009
: 23 Januari 2009

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN

ATAS
PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAN
DANA PENDIDIKAN DASAR LAINNYA
(APBN DAN APBD)
TA 2007 DAN 2008 (SEMESTER I)
PADA KABUPATEN SERANG
DI
SERANG

BPK RI PERWAKILAN PROVINSI BANTEN

Nomor : 05/LHP/XVIII.SRG/01/2009
Tanggal : 23 Januari 2009



Ati Kusuma
Orangtua SDN 11 Ciracas

"Awal masuk kena biaya. Biaya buku 2 x setahun Rp700 ribu berupa fokus dan buku bacaan. Yang dari BOS cuma buku Penjas, itu juga ada di perpustakaan. Tidak dipinjamkan ke siswa"



Elin
Orangtua SDN 1 Serang

"Katanya gratis, tapi kenyataannya engga. Waktu pertama masuk kena Rp400 ribu. Buku pelajaran Rp200 ribu, belum fokus, satunya Rp7.000. Yang kayak gini dibilang gratis, ini mah bayar"



Narfah
Orangtua SDN Pabuaran Unyur

"Sekolah gratis itu cuma bohong-bohongan. Tiap minggu ada saja harus beli ini, beli itu, beli anu. Buku harus bayar, daftar ulang harus bayar"

Tim Manajemen BOS Kabupaten Serang

Di Ping Pong Ke Sana Kemari

*"**Sungguh kontras** memang kondisi Dinas Pendidikan (Dindik) Kabupaten Serang dibandingkan dengan Dinas Pendidikan Provinsi Banten. Jika gedung Dindik Banten berlantai 3 plus satu basemen dilengkapi sejuknya hawa dingin AC, sedangkan gedung Dindik Kabupaten Serang tak bertingkat dan hanya dilengkapi pengapnya hawa panas dari sumpeknya ruangan yang ada"*

Oleh

Gabriel Jauhar, Feri Supriyatna

Jika di depan pintu utama gedung Dindik Banten dijaga oleh 2 orang satpam nan gagah, di depan pintu utama Dindik Kabupaten Serang hanya ada meja kusam yang sering kosong. Biasanya duduk di situ orang tua berseragam PNS yang warnanya mulai memudar.

Biar pun sudah tua, bapak itu dengan sigap mengatakan, bagian Renda Dindik Kabupaten yang dapat menjawab soal pelaksanaan BOS di Kabupaten Serang. "Itu belok kiri, pintu pertama. Iya itu pintu pertama," katanya.

Ruangan Renda penuh dengan meja dan lemari. Cahaya matahari pun sukar di dapat. Pegawai di sana menjelaskan, informasi BOS dapat langsung diminta ke Bina SMP yang ruangannya paling belakang.

Setelah berkeliling di dalam gedung Dindik Kabupaten Serang yang berbentuk O itu, tidak ada ruangan berplang Bina SMP. Ternyata untuk mencapai ruangan Bina SMP harus melalui ruang Aula Dindik Kabupaten Serang. Unik juga.

Ruang Bina SMP kumuhnya tak lebih baik dari ruang Renda. 3 ruang ukuran kurang lebih 3 x 3 m dideretkan, dijejali meja dan lemari. Tumpukan kertas kerja di tiap meja, seolah berlomba mana yang lebih tinggi. Saat itu sepi, hanya ada beberapa orang. Para pejabat BOS sedang menghadiri acara di Tangerang.

Beberapa hari kemudian, tak mau melewati ruang aula, ruang Bina SMP dapat dicapai melalui gang senggol sebelah kiri gedung Dindik Kabupaten Serang. Saat itu ramai sekali. Sudah sempit, penuh oleh orang berseragam PNS. Cara berjalan terpaksa meniru kepiting, miring, agar tak menyenggol orang lain.

Pegawai di Bina SMP langsung menunjuk Agustinus yang sedang berjalan menuju ruangannya. Orang yang paling berwenang menjawab BOS. Setelah diikuti hingga ruangannya, Agustinus akhirnya memberikan jawaban.

"Soal BOS ya? Itu ke Bagian Renda saja," kata Agustinus santai dan langsung menghadapkan mukanya ke arah lain.

Di Bagian Renda, jawaban yang sama terdengar. Bagian Bina SMP yang harus menjawab tentang pelaksanaan dana BOS. 2 pegawai Renda ngotot bekerja sama menjelaskan tanggung jawab itu ada di Bina SMP.

Tak secuil pun informasi pelaksanaan BOS Kabupaten Serang di dapat. Terngiang pepatah "guru kencing berdiri, murid kencing berlari". Ternyata lebih mudah bertanya soal per-kencingan ke penjaga WC umum, dibandingkan bertanya soal pendidikan ke Dindik Kabupaten Serang. (***g***)

14 Item Pengeluaran BOS 2009

1. Pembiayaan seluruh kegiatan penerimaan siswa baru, yaitu biaya pendaftaran, penggandaan formulir, administrasi pendaftaran, dan pendaftaran ulang, serta kegiatan lain yang berkaitan langsung dengan kegiatan itu.
2. Pembelian buku referensi di perpustakaan.
3. Pembelian buku teks pelajaran di perpustakaan.
4. Pembiayaan kegiatan pembelajaran remedial, pembelajaran pengayaan, olahraga, kesenian, karya ilmiah remaja, pramuka, palang merah remaja dan sejenisnya.
5. Pembiayaan ulangan harian, ulangan umum, ujian sekolah dan laporan hasil belajar siswa.
6. Pembelian bahan-bahan habis pakai seperti buku tulis, kapur tulis, pensil, spidol, kertas, bahan praktikum, buku induk siswa, buku inventaris, langganan koran/majalah pendidikan, minuman dan makanan ringan untuk kebutuhan sehari-hari di sekolah.
7. Pembiayaan langganan daya dan jasa, yaitu listrik, air, telepon, termasuk untuk pemasangan baru jika sudah ada jaringan di sekitar sekolah.
8. Pembiayaan perawatan sekolah
9. Pembayaran honorarium bulanan guru honorer dan tenaga kependidikan honorer.
10. Pengembangan profesi guru seperti pelatihan, KKG/ MGMP dan KKKS/MKKS.
11. Pemberian bantuan biaya transportasi bagi siswa miskin yang menghadapi masalah biaya transport dari dan ke sekolah.
12. Pembiayaan pengelolaan BOS seperti alat tulis kantor (ATK), penggandaan, surat menyurat, insentif bagi bendahara dalam rangka penyusunan laporan BOS dan biaya transportasi.
13. Pembelian komputer desktop untuk kegiatan belajar siswa, maksimum 1 set untuk SD dan 2 set untuk SMP.
14. Bila seluruh komponen 1 s.d 13 di atas telah terpenuhi pendanaannya, sisa dana BOS dapat digunakan untuk membeli alat peraga, media pembelajaran, mesin ketik dan mebeler sekolah.

Sumber: Buku Panduan BOS Dirjen Manajemen Dikdasmen Depdiknas

Aceng Hasani

"Sebab Faktor Lingkungan"

Oleh Feri Supriyatna

*"**Guru kencing** berdiri, murid kencing berlari" sebuah pepatah yang sebenarnya menyudutkan para pendidik. Pepatah itu seakan-akan mengatakan, kesalahan seseorang tentu akibat kesalahan gurunya.*

Aceng Hasani, dosen fakultas pendidikan di Universitas Tirtayasas (Untirta) Serang mengatakan, faktor lingkungan lebih berpengaruh terhadap perilaku seseorang. Zaman sekarang, faktor guru kurang berpengaruh.

"Guru pasti mengajarkan hal yang baik pada muridnya, apalagi kami yang mendidikan calon-calon guru. Selain teknis pengajaran dan mata kuliah resmi, kami juga sering menasehati calon-calon guru untuk menjadi tauladan masyarakat," kata Aceng Hasani.

Sayangnya, ajaran atau nasihat tentang etika dan moral pendidik bak himbauan agama. Mudah hilang tertelan lingkungan. Contohnya, agama memerintahkan untuk sholat 5 waktu, tapi banyak orang tidak melakukan sholat wajib itu.

"Jadi, kalau memang benar temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tentang penyimpangan dana pendidikan ditingkat satuan pendidikan (sekolah), bukan berarti lembaga yang menghasilkan para pendidikan itu ikut salah," katanya.

Aceng menuding faktor lingkungan lebih berpengaruh terhadap penyimpangan itu. Guru yang seharusnya berkonsentrasi dibidang belajar-mengajar, kini harus juga mengurusi administrasi keuangan dan bersentuhan langsung dengan dunia birokrasi.

"Jumlah uang yang dikelola sekolah sekarang, bukanlah jumlah yang sedikit bagi guru. Ini juga mengundang perhatian pengawas resmi dan tidak resmi. Sementara mental pengawas juga tidak dapat dikatakan bagus. Apalagi pengawas tidak resmi yang biasanya berujung pada transport," ujarnya.

Apalagi bila ditelaah item per item yang diperkenankan menggunakan dana BOS. "Apakah dana BOS sudah dapat meng-cover seluruh operasional sekolah? Apakah dana BOS dapat dipakai transport? Tanpa transport, bagaimana sekolah bisa berjalan?," tanya Aceng.

Menurut Aceng Hasani, dengan kebijakan pengelolaan keuangan dibebankan pada tingkat sekolah, seharusnya pemerintah juga mengeluarkan kebijakan penambahan tenaga kerja yang khusus menangani administrasi sekolah.

"Ini kan masih banyak sekolah yang administrasinya ditangani oleh satu orang saja. Akhirnya, untuk mengelola dana BOS, dirangkap oleh guru. Beban bertambah, penghasilan tidak jauh berbeda. Konsentrasi mengajar jadi berkurang, murid yang jadi korban," katanya. (***g***)



Elin
Orangtua SDN 4 Serang

"Boro-boro gratis, tapi tahu ya. Bayaran bulanan emang engga ada sih, tapi bayaran buku ngelumbuk. Mana mahal lagi"



Asmawati
Orangtua SDN 3 Serang

"Waktu masuk kena Rp800 ribu. Tapi kalau ditagih, bapaknya bilang suruh bikin surat tagihan. Sekolah engga berani. Jadi ya belum dibayar. Tahun kemarin buku fokus Rp80 ribuan. Buku paket beli sendiri di Yuri (nama pengecer, red).



Kokom
Orangtua SDN Kb Jahe

"Ngomong gratis tapi aya wae nu kudu dibayar (ngomong gratis tapi ada saja yang harus dibayar). Eweuh nu gratis mah (engga ada yang gratis mah)"

BOS Dimata Kepala Sekolah

“Kami Terpaksa Berhutang... “

Oleh
Gabriel Jauhar
Feri Supriyatna

SDN Cinanggung Kota Serang



SD yang terletak tepat diantara 2 komplek, yaitu Komplek Guru, Penancangan dan Komplek Pasir Indah, Cinanggung, Kota Serang ini, memang mempunyai siswa yang cukup banyak, yaitu 550 siswa dalam 12 kelas. Satu kelas rata-rata berjumlah 45 siswa.

Dengan jumlah siswa sebesar itu, SD Negeri Cinanggung mendapatkan dana BOS kurang lebih Rp18 juta per bulannya. Jumlah ini dirasakan cukup oleh Leni Sukmawati, Kepala Sekolah (Kepsek) untuk mengelola sekolah yang dipimpinnya itu.



“Dengan adanya BOS, kegiatan-kegiatan di sekolah jadi lancar. Besaran dan kegunaan BOS juga sudah diatur jelas. Kalau dulu ada sumbangan BP3 dan Komite yang tergantung hasil musyawarah orang tua. Dengan BOS, bisa langsung kami gunakan, asal sesuai aturan,” kata Leni.

Sejak menerima BOS, pengakuan Leni, SDN Cinanggung tidak pernah memungut bayaran. Selain itu, spanduk bertuliskan “Sekolah Gratis” dan laporan penggunaan dana BOS selalu dipasang. “Silahkan mas, itu laporan penggunaan dana BOS ditempel di depan,” katanya menunjuk kaca kantor guru yang penuh dengan tempelan kertas.

Sedangkan soal buku pelajaran, Leni mengatakan, SD-nya menggunakan buku yang lisensinya sudah dibeli oleh Depdiknas. Harganya berkisar antara Rp6.000 hingga Rp12.000.

“Kami utamakan buku pelajaran yang di-UN-kan (ujian nasional, red). Misalnya matematika, ya dari kelas 1 sampai dengan kelas 6, kami belanjakan matematika. Jadi anak-anak engga



usah beli lagi,” ujarnya.

Teknis pelaksanaan BOS diatur hingga pengeluaran rutin tiap bulan, seperti listrik, air dan telepon. 3 biaya jasa itu dipatok maksimal 6 persen dalam setahun. “Kalau biaya telepon tidak pernah kami gunakan untuk biaya koneksi internet. Sekarang kami tidak pasang internet. Dulu iya, tapi gratis,” katanya.

Menurut Leni, saat itu ada pengarahan dari PT Telkom di SMK Negeri Serang (node jaringan pendidikan nasional/Jardiknas) tentang kerjasama PT Telkom dan Depdiknas soal pemasangan koneksi internet gratis selama 3 bulan. Lewat 3 bulan, sekolah harus membayar biaya koneksi itu.

“Biaya per bulannya kami anggap mahal, jadi tidak kami teruskan. Kemarin ada penawaran koneksi internet dan pembuatan website dari JIP,” ujarnya.

Penawaran itu datang saat musim liburan sekolah. Dalam penawaran itu juga disertakan surat pengantar dari Dinas Pendidikan (Dindik) Provinsi Banten. “Saya lupa harganya. Suratnya ada di rumah. Kalau saya sih, mau ada surat pengantar atau tidak, tidak pengaruh. Kalau suruh bayar, mau bayar dari mana? Sekolah ini sudah tidak memungut apa pun. Masa mau dari dana BOS?,” katanya.

Keberadaan BOS bagi Leni sangat membantu kegiatan sekolah, sayang pencairan dana BOS sering terlambat. “Terutama di awal tahun. Tak mungkin garagara BOS belum turun, kegiatan sekolah harus dihentikan. Demi lancarnya kegiatan, terpaksa kami harus nyari hutangan dulu,” ujar Leni Sukmawati.

BOS 2007/2008	
SD	Rp254.000
SMP	Rp354.000
BOS Buku	Rp22.000

BOS 2009	
Kabupaten	
SD	Rp397.000
SMP	Rp570.000
Kota	
SD	Rp400.000
SMP	Rp575.000

SDN Gowok Curug Kota Serang



Evi Supriati, Kepala SD Negeri Gowok, Kecamatan Curug, Kota Serang mengatakan, dirinya tidak berani menggunakan dana BOS diluar aturan. Katanya, dana BOS diawasi banyak lembaga, mulai dari dinas pendidikan tingkat kecamatan hingga provinsi. Belum termasuk Itjen, BPKP dan BPK.

“Kalau engga bener, nanti ketahuan. Terus terekpos. Kalau sudah terekpos, engga enak. Pokoknya engga enak aja. Banyak yang datang. Ada yang baik-baik, ada yang datang marah-marah. Repotnya, sebagian besar minta transport. Kalau kena ekspos, pokoknya cape hati,” katanya.

BOS tahun ini dicairkannya setiap bulan, tidak seperti BOS tahun kemarin yang cair setiap 3 bulan sekali. “Bener yang tahun ini, cair setiap bulan. Jadi uang yang dipegang sekolah juga tidak banyak. Toh, kalau cair per triwulan, dipakainya juga tidak



sekaligus, tetap sesuai kebutuhan. Sisanya kan harus disimpan di sekolah, resikonya tinggi,” ujarnya.

Besaran BOS menurut Evi sudah mencukupi keperluan operasional sekolah. “Ya enakan BOS, semuanya sudah diatur. Untuk kapur berapa, untuk listrik berapa, untuk ulangan berapa. Bahkan untuk beli buku pelajaran juga ada. Cuma memang kami harus belajar banyak soal administrasi keuangannya,” katanya.

Buku yang dibeli dari sekolah memang diberikan ke murid, tapi tetap milik sekolah. Saat kenaikan kelas, murid harus mengembalikan buku itu ke sekolah dan digunakan adik kelasnya.

Sebenarnya masalah yang dihadapi SDN Gowok bukan



BOS, tetapi lokal kelas yang kurang. Evi yang baru 6 bulan menjabat Kepsek di sana, berkeinginan meningkatkan ruang kelas. “Agar siswa tidak berjubel kalau belajar. Pak lurah sudah ngasih tanah buat pendidikan, tapi biayanya tak kunjung turun. Pernah ada ide melibatkan orang tua murid dan masyarakat. Kami masih takut dikira melakukan pungutan,” ujar Evi.

Komite Sekolah yang mendampingi Evi menceritakan pengalaman pungutan itu. Selain ruang kelas yang tidak cukup, kondisi kelas juga banyak yang tidak memadai. Ada kelas yang belum mempunyai plafon, sehingga saat hujan, tetesan air masuk ke dalam kelas.

“Komite bermusyawarah dengan orang tua murid. Akhirnya disepakati nilai Rp20 ribu per siswa untuk plafon itu. Tahu-tahu kena ekspos. Padahal kan ini hasil musyawarah, tapi tetap di ekspos. Disangkanya membangun plafon itu ada untungnya. Kalau mau ekspos, coba ekspos yang baiknya,” ujarnya.

SMP Negeri 10 Cipocok Jaya Kota Serang



Wawan, Kepala SMP Negeri 10 Kota Serang mengklaim pelaksanaan BOS di sekolahnya tidak menyimpang dari aturan. Walaupun disisi lain, Wawan mengakui tidak hapal satu per satu item yang diperbolehkan oleh BOS.

“Secara global penggunaan dana BOS di sekolah kami tidak keluar dari 13 item yang sudah ditentukan oleh dinas. Kalau satu per satu itemnya, saya lupa. Yang tahu pengelola BOS,” kata Wawan.

BOS tahun 2008 di SMPN 10 diterima setiap 3 bulan sekali, walau pun tidak tepat waktu. Misalnya BOS untuk bulan April, Mei, Juni, hingga pertengahan Juni dana BOS belum juga turun. Padahal seharusnya dana itu sudah diterima awal bulan April.

“Untuk menanggulanginya, kami terpaksa pinjam. Kadang pinjam ke Koperasi Sekolah atau Koperasi Guru. Sering juga ke tempat yang lain. Ada saja yang mau nalangin dana itu. Ini terpaksa dilakukan, kegiatan belajar mengajar tidak mungkin dihentikan,” ujarnya.

Dengan jumlah siswa 1.034 orang, SMPN 10 diperkirakan menerima BOS Rp49,5 juta tiap bulannya. Biasanya ada pemeriksaan dari dinas setelah dana diterima. “Pemeriksaan kadang sebulan atau 2 bulan setelah cair. Yang meriksa dari dinas bagian BOS dan Inspektorat, Bawasda dulunya, dari provinsi,” katanya.

Sejak adanya peraturan Walikota, SMPN 10 mengaku tidak pernah melakukan pungutan, termasuk pungutan bagi siswa baru. Semua anggaran sudah ada di Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) dan sudah cukup dibiayai oleh BOS.

Soal koneksi internet, Wawan mengaku mendapat instruksi dari Dinas Pendidikan (Dindik) Provinsi Banten untuk memasang koneksi internet ke PT Telkom. SMPN 10 termasuk 25 sekolah yang dipanggil Dindik Banten terkait koneksi internet. Instruksi ini dikeluarkan saat pelaksanaan Workshop ICT. Alasan Dindik instruksikan pemasangan internet itu, menurut Wawan, karena sudah ada kerjasama antara Dindik Banten dengan PT Telkom.

Namun Wawan tidak mau menjelaskan lebih lanjut saat ditanya soal keberadaan penawaran PT Jaringan Informasi Banten (JIPB) sebesar Rp1,75 juta. (***g***)

Kota Seribu Masjid Lokasi 25 KK Transmigran Serang



Lega rasanya saat roda pesawat Wings Air menapak Bandara Sultan Babullah, Kota Ternate, Maluku Utara pukul 11.00 WIT (09.00 WIB). Selama 55 menit tim Pemetaan Lokasi Transmigrasi mengangkasa dari Bandara Samratulangi, Manado, Sulawesi Utara dengan penuh khawatir. Maklum, pesawat kecil bermesin baling-baling.

Di gerbang, Mansyur dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara (Malut) sudah menunggu. Tak lama, kijang Avanza meluncur ke hotel. 25 menit perjalanan, terlihat pertokoan dan perumahan tertata rapih. Kota yang cantik, warga yang menghargai keindahan. Hawa sejak menyertai.

Pelabuhan Bastiong sangat terkenal di Maluku Utara. Bastiong bukan hanya pelabuhan, tapi juga pusat transaksi bisnis Malut. Mulai dari sandang, pangan, papan hingga perjalanan pariwisata.

Daerah Provinsi Malut berupa kepulauan. "Di Malut transportasi laut sangat vital. Hanya memakai speed boat kita bisa mengunjungi kerabat. Yah masih dapat dikatakan murah biayanya," kata Mansyur, pendamping dari Pemprov Malut.

Sebuah speed boat dirental tim untuk menuju pelabuhan Kota Baru di Pusat Pemerintahan Kota Tidore Kepulauan. Kaget juga mendengar harga rental speed boat itu. "Kaget kang ya, ongkos *speed boat* mesin dua ini harganya satu juta pulang pergi," katanya sambil tersenyum.

Walaupun raungan mesin speed boat membuat sakit telinga, tapi terbayarkan indahnya Maluku Utara. Deburan ombak mengiringi perjalanan, horizon dipenuhi bayangan pulau-pulau. Ikan laut, terutama lumba-lumba terus berpacu melawan speed boat yang kami tumpangi.

30 menit kemudian tim di Pelabuhan Rum, Tidore. Walau tak seramai Pelabuhan Bastiong, hiruk pikuknya luar biasa. Speed boat memang transportasi utama, pelabuhan menjadi pusat kegiatan.

Dari pelabuhan, masih 15 km menuju pusat pemerintahan. Taksi ala Pulau Tidore, ternyata kijang Avanza milik pribadi mengantar kami. Ongkosnya tak tanggung-tanggung, Rp500 ribu pulang pergi.

Jalan halus, sepi, bersih, sejuk mungkin itu yang bisa diungkapkan teman-teman tim. "Enak ya disini sejuk, sepi jauh dari kebisingan kota juga sepanjang jalan disini kita tidak melihat jalanan kotor, sampah yang menumpuk pokoknya betah saya disini," ujar Oman, Kabid Transmigrasi Kabupaten Serang.

Di Kantor Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kota Tidore Kepulauan, kami disambut Drs Muhadi, Sekretaris Dinsosnakertras dan langsung dipersilahkan masuk kedalam ruang kerjanya.

"Maksud kedatangan kami kesini jauh-jauh dari Banten untuk silaturahmi sekaligus minta izin untuk meninjau lokasi yang diperuntukan bagi transmigrasi asal Kabupaten Serang sebanyak 25 KK," kata Oman selaku perwakilan Pemerintah Provinsi Banten itu.

Sekretaris Dinsosnakertrans mengatakan, bahwa lokasi yang bakal dihuni oleh transmigrasi asal Kabupaten Serang, Banten sudah siap. Segala permasalahan berupa tanah, itu sudah diserahkan pihak pemerintah Tidore Kepulauan, serta sudah ada restu dari Kesultanan Tidore.

"Lokasi itu sudah siap, segala sesuatu yang menyangkut berupa kawasan transmigrasi sudah rampung, baik kesultanan Tidore maupun Pemerintah Kota Tidore Kepulauan sudah menyatakan selesai," kata Muhadi sumringah.

Pemerintah Kota Seribu Mesjid berharap, kedatangan para transmigran itu dapat membawa dampak positif berupa pertukaran keahlian di berbagai bidang. Terutama bidang pertanian dan perkebuan, warga setempat masih minim untuk mengerjakannya.

Mahmud, supir taksi itu mengatakan, para transmigran itu diharapkan oleh warga setempat. "Enak kalau banyak orang di sini pak, tahu sendiri kalau di sini sepi," katanya.

Mahmud memang tak memungkiri jika hidup layak di Provinsi Malut jauh lebih mahal dibandingkan di Pulau Jawa. "Contohnya aja harga mobil disini bisa mencapai Rp 170 juta, kalau di-jawa-kan hanya berkisar Rp 130 juta merk kijang avanza. Dan bukan itu saja belanja kebutuhan pokok disini bisa lima kali lipat dari harga di jawa. jadi uang seratus ribu disini kaya ga punya uang,"ungkapnya polos.








Malam di Ternate

Setalah istirahat kurang lebih 3 jam sekitar pukul 18.30 WIT, tim mencoba mencari masakan khas Ternate. Sambil berjalan kaki tim akhirnya menemukan tempat makan khas Ternate yaitu ikan bakar. Luar biasa pedas dan tak ketinggalan sayur tumis kangkungnya. Kebetulan tempat tim santap makan malam tepat di seberang jalan Kantor Gubernur Maluku Utara.

Ramai, itulah kesan pertama ketika malam hari di kota Ternate. Tidak jauh memang dengan kondisinya dengan kota-kota lain, Cuma yang membuat tambah ramainya malam itu adalah deburan ombak. Kebetulan, dibelakang tempat kita makan adalah laut lepas.

Setelah makan kita mencoba untuk menikmati malam Kota Ternate, sepanjang pantai terlihat kumpulan orang, tak ketinggalan muda mudi yang sedang menikmati malam. Sambil menikmati kopi, kami berbaru dengan mereka. Tak terasa waktu sudah menunjukan pukul 22.00 WIT, tim memutuskan untuk beristirahat.

Lokasi Transmigran

06.30 WIT, meluncur ke Pelabuhan Bastiong. Seluruh tim kaget, tarif speed boat ke lokasi transmigran, yaitu Desa Maidi, Kecamatan Oba, Kota Tidore Kepulauan, Maluku Utara untuk perjalanan pulang pergi, pemilik speed boat memasang tarif Rp5 juta, kurang lebih 3 jam perjalanan.

Baru berjalan 20 menit, *speed boat* belok kiri ke pelabuhan Goto menjemput KUPT Kalikosa SP 2 Ishak Lukman. Tak lama, kembali melanjutkan perjalanan.

Memang indah kita berjalan di atas laut pacific, selain pemandangan gugusan pulau kita juga sesekali dalam terjangan




ombak melihat beberapa ekor ikan lumba-lumba mengikuti perjalanan tim.

Sambutan masyarakat disana cukup antusias, begitu ada tamu mereka langsung menghampiri berjabat tangan. "Maaf pak, kebetulan kepala Desa sedang ada acara bersama pak Camat," aku warga ketika Rahmat menanyakan keberadaan kepala Desa Maidi.

Lokasi transmigran masih 3 km lagi. Dari pada jalan kaki lebih baik kita naik truk, lumayan pak, ke lokasi dua kilometer, pasalnya cuma ini satu-satunya kendaraan itu juga kalau ada,"kata Ishak Lukman sambil tersenyum.

Lokasi itu luasnya sekitar 200 Ha, cukup untuk menampung 200 KK transmigran, termasuk 25 KK dari Serang. "Pokoknya tidak usah kuatir pak, tanah disini sangat subur, tanahnya juga gembur dan bagus ditanami palawija. Selain itu juga didepan tanah ini akan dibangun jalan trans Maluku dan tidak kurang dari 15 Km akan dibangun Pusat Pemerintahan Provinsi Maluku Utara tepatnya didaerah Soupipi-Halmahera," jelas Umar kontraktor pelaksana pekerjaan pembangunan hunian transmigrasi.

Sebelum kedatangan para transmigran sekitar bulan Desember, rumah dan fasilitas umum sudah rampung dikerjakan. Rumah transmigran tipe 29 dengan 2 kamar tidur, dapur, WC dan fasilitas ibadah. Transmigran juga mendapatkan lahan 1 hektar.

"Saya jamin mereka (Transmigran, red) akan betah disini pak. Selain tanah yang sangat subur, transmigrans di sini yang punya hobi melaut tinggal berjalan kaki. Insya Allah ketika mereka bisa berusaha saya yakin bakal sejahtera," tambahnya.

Zaki, warga yang ikut rombongan mengungkapkan, di sini sepi, mudah-mudahan keberadaan transmigrans dapat meramaikan kampungnya dan bisa tukar keahlian. "Justru kami sangat mendukung dengan adanya program transmigrasi ke daerah kami, selain nantinya kampung kami jadi ramai, juga kami bisa menimba ilmu bidang pertanian dari mereka," ungkapnya polos.

Setengah dua waktu setempat, tim memutuskan untuk kembali ke Ternate. Setelah berpamitan dengan aparat dan warga desa, kami pun berangkat pulang. Tepat jam 17.30 waktu setempat *speed boat* yang kami tumpangi merapat di pelabuhan Bastiong-Ternate.

"Ini malam terakhir kita disini, besak jam 7.10 tepat kita *take off* di bandara Sultan Babullah sekarang semuanya istirahat," kata Rahmat, sambil tersenyum jangan lupa oleh-olehnya buat anak.

Akhirnya tepat jam 7.10 tim *take off* menumpang pesawat Batavia Air langsung menuju Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang.

(***e***)






Agustinah, Kasi Seksi Norma dan Keselamatan Kerja

"Pekerjaan Layak Adalah Pekerjaan Aman"

***Pengawasan** ketenagakerjaan begitu penting, antara lain mengembangkan kapasitas preventif untuk memberikan andil dalam membangun budaya pencegahan di dunia kerja.*

"Kita membutuhkan pedoman pengawasan yang diharapkan, baik berupa penilaian komprehensif terhadap perangkat keras atau proses kimia, pengambilan sample secara selektif dari departemen tertentu atau bidang kegiatan tertentu, evaluasi kualitas dan kompetensi dari penilaian resiko yang dilakukan oleh pengusaha sendiri, atau mengkaji sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja," ungkapnya.

Ia menuturkan, tidak ada satu model tunggal yang benar, tetapi manajemen pengawasan perlu menjelaskan pendekatan apa yang di harapkan dalam keadaan yang berbeda atau pada waktu yang berbeda. Perusahaan yang dikelola dengan buruk atau secara tidak kompeten mungkin pada awalnya memerlukan pengawasan yang sangat teliti terhadap perangkat keras, meskipun banyak pengawas berpengalaman dapat mengukur secara memadai dengan pengambilan sample secara selektif.

Di samping itu, menggunakan kekurangan-kekurangan yang dijumpai untuk mendemontrasikan tidak memadainya proses penilaian risiko atau pengendalian manajemen terhadap keselamatan dan kesehatan juga efektif."Pengawas harus selalu tahu apa yang di harapkan dari mereka ketika melakukan wawancara dengan manajemen senior dan ketika bertemu dengan pekerja dan serikat pekerja".

Ina pun menjelaskan, serangkaian sanksi yang dapat dijatuhkan oleh pengawas. Akan tetapi, diperlukan pedoman yang jelas mengenai keadaan-keadaan yang tetap untuk tiap-tiap pilihan. Pengawas dan pimpinan mereka tentunya perlu diberi keleluasaan yang cukup besar supaya mereka dapat menyesuaikan tindakan mereka dengan keadaan-keadaan tertentu. Akan tetapi, batas-batas keleluasaan mereka perlu digariskan dengan jelas supaya pengawas dan manajemen yakin akan dukungan yang mereka dapatkan dalam aksi apapun yang akan mereka mulai.

Memastikan Keadilan & Konsistensi

Meskipun disatu sisi pengusaha menghargai digunakannya keleluasaan pada tingkat tertentu dalam peran pengawas, yang jelas berbeda dari mekanisme penegakan biasa, disisi lain pengusaha merasa sangat terganggu apabila dibagian pesaing-pesaing mereka terlihat mendapat perlakuan yang lebih lunak.

"Apabila ini terjadi akan menimbulkan protes terhadap institusi pengawasan ketenagakerjaan. Tentunya, organisasi yang efektif harus mempunyai prosedur yang dapat memastikan adanya konsistensi secara luas dalam penafsiran dan penegakan standar pengawas,"harapnya

Program pemantauan dan evaluasi, katanya, secara positif adalah sangat penting dan hendaknya meliputi *output* berupa waktu yang dihabiskan untuk melakukan pengawasan atau jumlah kunjungan atau pengawasan yang telah dilakukan, dan hendaknya berupaya melakukan penilaian terhadap kualitas pekerjaan.

Begitu pula, pimpinan pengawas senior hendaknya menilai kinerja unit regional dan lokal, tidak saja dengan memeriksa catatan dan statistik, tetapi juga dengan menemui dan secara berkala mengawasi staf local. Kegiatan pemantauan ini pada efeknya merupakan proses dua arah karena pimpinan senior akan menjadi sadar akan kekeliruan persepsi atau kesalahpahaman yang telah terjadi sehingga mereka dapat memodifikasi panduan atau instruksi yang mereka berikan.

"Yang paling penting, evaluasi dan presentasi hasil secara sistematis dan tepat, baik dari segi kuantitas maupun kualitas, dapat meningkatkan kredibilitas institusi pengawasan ketenagakerjaan, dan kita terus menekankan bahwa pekerjaan yang layak adalah pekerjaan yang aman,"jelasnya. (**adv**)

Biaya Pendaftaran SMAN 3 Taktakan Mencekik Leher

Kota Serang - Komunitas, Banyak orang tua murid yang akan memasukkan anaknya di SD, SMP atau SMA kebingungan. Sehingga banyak orang tua murid seakan tak percaya dengan aturan yang kurang bisa diterima akal. Para orang tua murid tersebut seakan buntu, karena harus menuruti aturan yang diyakini tak tepat.

"Bagaimana kami bisa menerima mas, dialog yang katanya antara pihak sekolah-komite sekolah-orang tua murid, ternyata dialog tersebut sepertinya akal-akalan pihak sekolah. Karena belumpun ada tanya jawab atau usulan dari wali murid pihak sekolah sudah ketuk palu, dan itu disetujui Komite sekolah," kata ibu Idah, yang akan memasukkan anaknya ke SMAN 3, Taktakan, Kota Serang.

Menurut ibu Idah, karena ketuk palu orang tua murid harus membayar biaya-biaya yang telah disodorkan pihak sekolah. Katanya, biaya itu, diantaranya, bayar biaya investasi Rp 450 ribu, dana operasional Rp120 ribu, dana SPP Rp60 ribu. Selain itu juga ada biaya seragam Rp567 ribu, biaya LKS Rp272 ribu dan biaya ITC Siaga Rp300 ribu.

Maka biaya-biaya itu bila dijumlah hampir mencapai Rp2,5 juta per siswa. Ujarnya, wali murid seakan merasa percuma bila usul pada Kepala Sekolah, Muhamad Supri, sebab ada yang menanyakan yaitu wartawan, kepala sekolah itu hal yang lajim, dan sudah merupakan ketentuan. Muhamad Supri katanya, keberhasilan dari eksen kerja sebab untuk dibutuhkan biaya yang ditentukan itu.

"Alasanya kepala sekolah selalu meningkatkan mutu pendidikan, jadi kalau tidak ada biaya tidak bisa apa-apa. Mutu yang bagaimana sih, bagamana kami mutu pendidikan baik bila kepala sekolah saja cara berpikirnya tidak mutu. Kalau begutukan rasanya mencekik leher warga yang hidupnya pas-pasan," katanya.

Lain halnya dengan ibu Eni, katanya, ia juga kaget ketika mendengar ada uang daftar ulang yang besarnya Rp1,5 juta.

Menurutnya, daftar ulang itu hanya cara akal-akalan untuk mengeruk keuntungan. Sedangkan pihak dinas mengumumkan tidak ada uang pendaftaran dan daftar ulang yang begitu besar.

"Kami akan mengadu kemana, lalu Bos dan sekolah gratis-sekolah gratis itu bagaimana. Maka kami minta pada Pak Walikota Serang atau wakilnya, agar mengetahui hal ini, bagaimana janjinya ketika nyalon yang ingin menringankan beban rakyat dalam hal pendidikan," ujarnya.

(**Ibnu PS Megananda**)

Cilegon Gratiskan Sekolah

Cilegon, Komunitas - Sekolah gratis, kesehatan gratis tidak hanya semboyan. Agaknya program yang pro rakyat kecil tersebut dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon. Karena Pemkot Cilegon benar tidak hanya selogan gratis, namun benar menggratiskan sekolah dan kesehatan untuk masyarakat umum.

Menurut asisten daerah (Asda) III, Kota Cilegon, Bambang P Sumo, baru-baru ini di Cilegon, Peningkatan Pelayanan Publik terus dievaluasi. Ujarnya walau Peningkatan Pelayanan Publik akan mendapat penilian dari Tim Provinsi Banten tapi bukan karena itu. Karena memang pembanunan termasuk pelayanan benar-benar dilakukan sejak Cilegon pisah dengan Serang membentuk pemerintahan sendiri.

Katanya, sekolah gratis dan kesehatan gratis bukti Pemkot Cilegon melayani rakyat. Terlebih pada pendidikan, sehingga untuk pendidikan semua kebutuhan sekolah dari pendaftaran, buku, biaya ulangan dan administrasi lainnya dianggarkan dari APBD. Maka pihak sekolah tidak diperbolehkan memungut dari wali murid. Kata Sumo, PAD Cilegon cukup besar dan PAD diperuntukkan untuk rakyat. Dengan demikian mulai SD-SMA di Cilegon gratis, terlebih lagi hal berobat, maka ditingkatkannya tipe RSUD, kini menjadi tipe B.

"Indek pelayanan public tiap tahun naik 7,2 persen. Kalau ada kritikan bahkan demo yang kadang kerap dilakukan aktivis ya silahkan saja itu juga bagian dari mengingatkan pemerintah. Namun kami minta ya mengutarakannya itu dengan santun, karena kitakan orang timur yang mempunyai nilai adat yang tinggi," kata Bambang P Sumo.

Tokoh Masyarakat Merak, Cilegon, Ch Hutauruk, tak menyangkal keinginan Kota Cilegon dalam menggaristiskan pendidikan. Katanya, hanya beberapa daerah saja di Indonesia yang benar-benar menggratiskan sekolah, di salah satu pemda di Bali, Kalimantan dan kini di Banten yaitu di Cilegon. Serang saja katanya yang pemdanya cukup tua soal menggartiskan sekolah tidak benar dari kenyataan.

"Lha untuk apa APBD itu kalau tidak dikasihkan pada rakyat. Kalau nggak dikasihkan berarti rakyat bias mencurigai. Kalau bilang gratis yang gratis, janga ngomong grtis tapi dipungut, itu menyakitkan rakyat, buat apa ada pemerintahan. Dan kesungguhan pemerintah daerah dalam mensejahterakan itu bisa dilihat kenyataannya,"tandasnya. (**Ibnu PS Megananda**)

Ibuku, Perpustakaan Pertamaku?

Serang, Komunitas - Kebutuhan terhadap perpustakaan kini tengah digandrungi oleh pelajar hingga masyarakat umum. Ini tentunya akan membawa dampak yang cukup baik, bukan hanya kegemaran membaca akan terpacu, bahkan keberadaan perpustakaan akan menjadi sebuah rumah singgah untuk menggali pengetahuan. Keberadaan perpustakaan yang representatif mestinya menjadi sebuah skala prioritas bagi pemerintah sendiri.

Sepertinya keinginan masyarakat Banten untuk memiliki gedung perpustakaan yang cukup representatif hanya tinggal hayalan. Saat ini keberadaan perpustakaan milik pemerintah Provinsi Banten, sudah tidak layak. Selain tempat yang sangat sempit, juga kondisi ruangan yang tidak teratur, mana untuk baca dan mana untuk mencari buku. Kesemuanya tersebut sangatlah memprihatinkan.

Seperti yang dikeluhkan calon mahasiswa Universitas Tirtayasa Nurul Handayani, bahwa, keberadaan perpustakaan sekarang sudah tidak layak yang semestinya, katanya, pemprov Banten sudah memikirkan fasilitas perpustakaan seperti gedung dan koleksi bukunya.

"Harusnya Pemprov Banten sudah memiliki sarana dan prasarana perpustakaan yang cukup baik dan layak. sampai sekarang harapan mempunyai gedung yang representatif ternyata tinggal harapan. Pasalnya beberapa waktu lalu, ketika saya mau melakukan tes masuk Untirta saya membutuhkan buku tambahan sebagai acuan ujian, tapi karena tempatnya sempit juga buku-buku yang tidak tersusun rapih pada akhirnya saya mengurungkan niat untuk mencari buku-buku tersebut," ungkapnya dengan nada kesal.

Nurul juga heran, kenapa gedung-gedung lain yang belum tentu mempunyai manfaat kepada langsung masyarakat sudah pada dibangun. Ia juga memberikan contoh seperti gedung KNPI yang sampai sekarang terlihat kosong tanpa terlihat aktivitasnya.

Tidak jauh berbeda dengan guru SMU Cikeusal Mumun, kepada KOMUNITAS, ketika bertemu diperpustakaan belum lama ini, mengatakan, kalau keberadaan perpustakaan milik Pemprov Banten yang ada sekarang ini sudah tidak memungkinkan untuk serius membaca buku apalagi, katanya, sampai terserap pengetahuannya. Cukup ironis menurutnya, sisi lain minat baca semakin tinggi, tetapi tidak ditunjang dengan fasilitas memadai seperti layaknya perpustakaan di provinsi lain.

"Saya heran Banten sudah berdiri sembilan tahun yang lalu, tapi kenapa sarana perpustakaan yang sangat penting dibutuhkan untuk masyarakat sebagai wahana menambah ilmu kenyataannya tidak mendapat perhatian serius. Anda bisa tahu sendiri bagaimana kalau kondisi semacam ini dibiarkan?" katanya, sambil memberikan contoh, kalau dirinya pernah melihat disalah satu stasiun tv yaitu Provinsi Riau memiliki perpustakaan yang sangat megah.

Rencana membangun gedung perpustakaan sudah ada, buktinya sebidang tanah sudah dibeli Pemprov Banten di depan Terminal Pakupatan, tak jauh dari Universitas Tirtayasa (Untirta) Serang. Tapi, kapan dibangunnya? (**Emboy Sumargana**)

GNPK Banten Ingatkan Dugaan Korupsi SMU Unggulan Rp62 Miliar

***Serang, Komunitas –** Muhammad Fitriyadi, Sekretaris II Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi (GNPK) Koordinator Provinsi Banten mengingatkan aparat hukum untuk membuka kembali kasus pembangunan SMU Unggulan yang menelan dana Rp62 miliar dari APBD Banten.*

"Kasus ini sempat mencuat tahun 2005, Kejati Banten sempat memanggil para pejabat terkait untuk dimintai keterang. Habis itu, hilang begitu saja. Padahal kan setidaknya ada bukti PBB ganda," kata Fitri.

Sekolah Menengah Atas Cahaya Madani Banten Boarding School (SMA CMBBS) di Kampung Kuranten, Desa Seruni, Kabupaten Pandeglang disoroti banyak pihak. Pasalnya, proses perwujudan sekolah ini banyak yag diselimuti "tabir", termasuk proses pembebasan lahan yang diduga kuat syarat dengan kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN).

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten sebenarnya sempat mencium kejanggalan dalam proyek SMU Unggulan. Sejumlah pejabat Dinas Pendidikan dan pihak terkait sempat dipanggil untuk dimintai keterangan. Namun hingga sekarang hasil pemeriksaan itu tidak pernah jelas, dalam artian berkas kasus ini tidak pernah ada, apalagi dilimpahkan ke pengadilan.

Kesan samar-samar atas proyek yang dinilai sebagai proyek akal-akalan oleh berbagai pihak ini memang sejak awal tidak memiliki konsep apa itu sebenarnya SMU Unggulan. Sebab sebelumnya, APBD Banten mencantumkan proyek pengembangan dan penelitian ilmu pengetahuan teknologi (Iptek). Proyek ini diubah menjadi dana stimulan untuk sekolah yang akan dijadikan SMU Unggulan di setiap 6 kabupaten dan kota di Banten. Dari proyek ini diubah lagi menjadi pembangunan SMU Unggulan yang dibiayai Pemprov Banten.

Kritik tajam pun segera menerpa Dinas Pendidikan Banten. Pasalnya, proyek SMU Unggulan itu justru bertentangan dengan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) dinas yang seharusnya menaungi dinas-dinas pendidikan di tingkat kabupaten dan kota, bukan asyik dengan mengerjakan proyek itu sendiri. Untungnya, proyek ini diselamatkan oleh UU No.20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) yang memberikan kewenangan daerah mengelola sebuah sekolah unggulan.

Tetapi pertanyaan yang seharusnya dijawab dengan mudah justru membuat bingung pejabat, yaitu berapa sebenarnya biaya yang telah dikeluarkan untuk SMU Unggulan, termasuk pembebasan tanah, studi banding pejabat, anggota dewan dan stakeholder? Tak ada jawaban pasti. Sebab proyek itu dipecah-pecah ke berbagai pos anggaran mulai dari Biro Perlengkapan, Biro Umum dan Dinas Pendidikan Provinsi Banten dengan nama kegiatan masing-masing yang terkesan tidak berkaitan dengan SMU Unggulan.

Dalam soal pembebasan lahan untuk SMU Unggulan di Kampung Kuranten, Desa Seruni, Kabupaten Pandeglang tercium indikasi kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN) yang begitu kuat. Terbukti, adanya 2 nilai jual objek pajak (NJOP) yang diterbitkan tahun yang sama, namun berbeda nilai. NJOP ini digunakan membebaskan tanah dari pemiliknya.

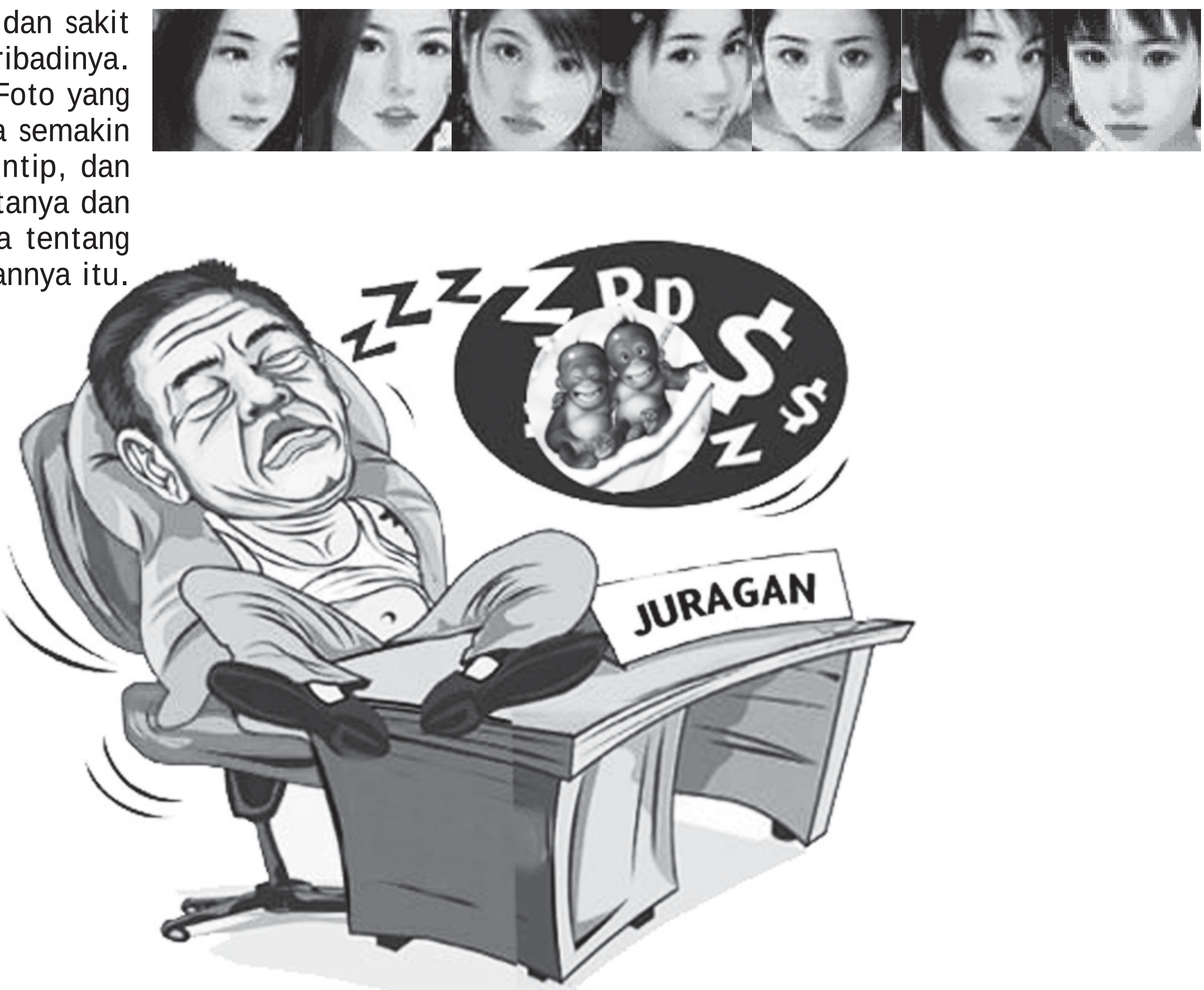
Penetapan NJOP yang pertama senilai Rp1.700/m3 sesuai dengan surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT) tanggal 1 Maret 2002 yang ditandatangani Kepala Kantor PBB Pandeglang, Noertjahya. NJOP ini digunakan untuk membeli tanah dari pemilik tanah atau warga setempat. Terbukti, tercatat 24 akta jual beli dari pemilik tanah ke 3 orang yang dinilai sebagai tokoh Banten. Mereka adalah Aceng Ishaq, Iyus Priatna dan Agah M Noor. Ketiga tokoh ini dikenal dengan Rawu, sebuah kelompok dominan di Banten. Kakaknya Wawan adalah Atut Chosiyah yang waktu itu menjabat Wakil Gubernur Banten. Total 10 hektare ini dihargakan Rp170 juta.

Sedangkan NJOP kedua senilai Rp36.000/m3 sesuai dengan SPTT yang diterbitkan Kepala Kantor PBB Pandeglang, LL Tobing tanggal 2 Januari 2002. NJOP ini digunakan Panitia untuk membeli tanah seluas 10 hektare dari 3 tokoh Banten itu. Totalnya Rp3,6 miliar dan uangnya berasal dari Pemprov Banten.

Selisih harga yang sangat jauh antara uang yang dinikmati pemilik tanah Rp170 juta dan uang yang dikeluarkan Pemprov Banten Rp3,6 miliar. Selisihanya, Rp3,43 miliar diduga dinikmati oleh oknum-oknum yang terlibat

Foto Istri-Istri Juragan Keranda

Juragan Abu Sakib akhir-akhir ini diserang encok dan sakit pinggang. Ia melihat foto-foto yang baris di meja pribadinya. Mata berbinar-binar melihat satu persatu foto itu. Foto yang berbaris itu semakin keujung membuat matanya semakin seperti akan copot. Para pengawalnya satu mengintip, dan mengajak yang lain. Para pengawal itu saling bertanya dan menebak dengan berbisik pada sesama temannya tentang prilaku tuannya itu.



Oleh
Ibnu PS Megananda

Napas Juragan Abu Sakib turun naik, matanya memelototi salah satu foto. Para pengawal itu dadanya berdebar-debar ingin tahu apa gerangan yang sedang terjadi pada Juragan Abu tersebut.

"Itu foto siapa yang kira-kira yang dilihat,"kata salah satu pengawal.

"See…t, jangan banter-banter bicaranya, nanti dengar juragan. Yang dipandang itu sepertinya barisan foto yang ujung," kata pengawal yang berkumis tebal.

"Tapi kalau melihat foto yang awal, juragan itu agaknya wajahnya marah seperti marah, dan melihat salah satu foto yang ada ditengah agaknya gusar. Tapi benar bila melihat foto yang ujung terakhir itu agaknya eksperesi juragan bergairah," ujar si pengawal yang botak.

Juragan Abu matanya memandangi foto yang ujung begitu lama. Lalu bibirnya tersungging senyum, mulutnya kumat-kamit seperti berbicara. Dan napasnya turun naik, namun semakin lama napasnya semakin kencang, hingga terdengar ngos-ngosan. Setelah itu ia menjatuhkan wajahnya di meja. Ia seakan tak sadar, dan tertidur pulas. Para pengawalnya bingung mendekati, tapi mereka tak berani membangunkan juragen gaek itu.

Para pengawal itu terpaksa menunggu juragannya hingga bangun sendiri. Karena mereka takut akan wanti-wanti dari Juragan Abu kalau lagi tidur dilarang walau siapapun untuk membangunkan. Mereka selalu melihat apakah tuannya itu masih bernapas, kehawatiran itu ada karena tuannya itu cukup tua usianya. Setelah lewat maghrib badan Juragan Abu bergerak-gerak siuman.

"Hai, si botak, kenapa celanaku basah," teriak Juragan Abu pada pengawal yang berkepala botak. Para pengawal berhamburan mendekat.

"Barangkali terkencing, juragan," jawab si botak. Juragan Abu, lalu ingat rupanya ia habis mengeluarkan sperma, dan tertidur pulas, sambil tetap duduk dikursi, sedang tangan dan kepalanya di meja.

"Tidak, tidak….,tidak terjadi apa-apa, kalian keluar semua aku ingin tenang,"pengawalnya diusir. Pengawalnya bergegas keluar.

Juragan itu senyum-senyum kembali melihat foto-foto itu. Tapi setelah berurut dari foto yang ujung hingga ke foto yang pangkal, sampai kepangkal ia menenangkan pandangannya. "Oh, kamu sudah tua sekali. Namun dari perut kamulah banyak anak-anakku yang sukses, malah ada yang jadi pemimpin di sebuah wilayah. Aku sangat terima kasih pada dirimu, karena engkau sebagai ibu bisa mengantar anak-anaknya hingga semua berhasil. Kalau tidak dari kesuksesan bimbinganmu mungkin aku juga tidak sebagai apa-apa. Paling hanya sebagai juragan biasa yang hanya punya para pekerja-pekerja," gumam Juragan Abu.

"Hai kemari, siapa yang diluar," teriak Juragan Abu. Para pengawal itu dulu-duluan datang mendekat.

"Kalian kenal Diyamul," tanya Juragan Abu.

"Kenal juragan," jawab pengawal yang berkumis tebal.

"Siapa dia,"

"Dia itu juragan keranda, katanya dia akan membuat seribu keranda,"

"Heh, untuk apa keranda, apa untuk dijual,"

"Tidak tahu tuan, tapi dia pernah mengatakan ingin jadi juragan keranda. Katanya bakal banyak orang meninggal terkena bencana. Maka keranda bakal dibutuhkan,"

"Aku tidak mengerti tingkah orang itu, semenjak ia gagal jadi dewan ulahnya ada-ada saja," kata Juragan Abu.

"Kalau begitu juragan tahu tentang dia,"

"Ya sedikit tahu,"

"Juragan keranda itu pernah mengatakan pada kami tuan. Katanya alam ini akan ngamuk, akan ada longsor dan banjir besar,"

"Heh, jangan dipercaya omong kosong seperti itu. Itu omongan orang edan, omongan orang yang tak punya kerjaan. Karena tak punya kerjaan maka ia selalu buat keranda," sergah Juragan Abu. "Nyah, ini uang, untuk makan kalian bertiga," kata Juragan Abu sambil memberi uang satu lembar uang lima puluh ribuan. Para pengawal itu pergi dengan perasaan yang sedikit kecut, karena hanya diberi uang lima puluh ribu untuk bertiga. Maka mereka hanya bisa mencari warteg untuk makan malam yang seharian mereka tak makan menunggu tidur juragannya.

Juragan Abu sewot atas kritikan Diyamul disebuah koran kecil. Juragan Abu menyobek-nyobek koran itu. Pasti itu para pengawalnya bertanya-tanya, dan salah satu pengawal memungut koran itu. Mereka mencari-cari ada berita apa hingga sempat menyinggung tuan besarnya itu. Namun koran yang sudah berkeping-keping itu dengan kalimat-kamimat terpisah-pisah karena sobekan-sobekan para pengawal itu tak menemukan berita atau kritikan dalam koran yang ditulis Diyamul.

"Dia ini siapa sebenarnya, katanya si pembuat keranda," kata Juragan Abu dengan nada tinggi.

"Dia ini orang yang suka mengganggu kerjaan juragan, seperti proyek perbaikan atau pembuatan jalan, gedung pemerintah, jembatan. Katanya kerjaan juragan kalau jalan cepat berlubang-lubang, kalau gedung cepat ambruk begitu pula jembatan maka banyak korban dari pekerjaan yang dia menganggap juragan tak sungguh-sungguh," kata pengawal yang kepalanya plontos itu.

"Cari-cari koran itu lagi, beli sana, cari sampai dapat," kata Juragan Abu.

"Koran itu tidak dijual juragan, koran itu dibagi-bagikan saja,"

"Sombong, apa pemilik koran itu sudah kaya memang,"

"Tidak tau juragan. Tapi saya dengar si pemilik koran itu namanya Mohet,"

"Yang penting cari koran itu sampai dapat. Akan saya permasalahkan nanti dia. Dia sudah mulai berani bicara tentang kerjaanku atas pembebasan tanah untuk perkantoran dan pemukiman para pejabat serta pegawai,"

"Tapi dia selalu mengatakan dirinya juga juragan,"

"Juragan apaan. Tidak ada itu juragan keranda. Dia kalau tetap usil dengan kerjaanku, akan aku kirim ia keakhirat," kata Juragan Abu dengan marah.

Tidak lama dengan keadaan marah, telpon berdering-dering. Juragan Abu bingung, istri dan anaknya yang dipinggir bukit kelongsoran tanah, sedang rumah istrinya yang dekat sungai besar yang melintasi kota itu diterjang banjir bandang. Sambil bergerak kesana-kemari memunguti foto-foto istrinya di meja, dan salah satu foto disimpan di dompet, foto istri yang paling termuda. Juragan Abu histeris, "keranda, cari keranda, tolong anak dan istriku, mengapa aku tanya cari keranda. Yang juragan itu saya bukan kamu," kata Juragan Abu ditujukan pada Diyamul. (***i***)

Banten, 2009



Wedang Jahe



Ibnu PS Megananda

Ngablun Sekolah

Si Samin seperti anak-anak tak mampu lainnya terpaksa ngablun (B.Jawa; tak masuk, mbolos) sekolah karena sangat terhimpit kebutuhan sekolah. Samin misalnya sebagai anak perkotaan mencari uang yang pada dasarnya membantu beban orang tuanya. Samin jadi pemulung, ngamen atau apa saja yang bisa mendapatkan uang. Kalau Samin-samin yang tinggal dipelosok seperti saya (penulis), cara mencari uang tentu berhubungan dengan tumbuhan sekitar desa, ada yang cari buah pinang, cari kemiri, kalau kebetulam panen padi ikut ngasak ditumpukan pohon padi yang baru dipisahkan antara buah dan tangkainya.

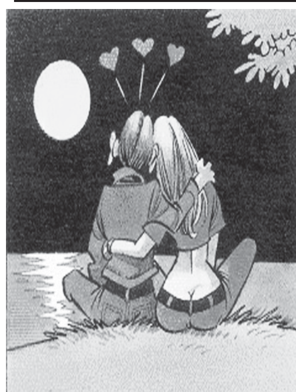
Ternyata anak-anak yang ngablun sekolah tidak hanya sekedar untuk sesaat mendapatkan uang namun memang kesulitan hidup. Karena anak-anak tersebut tidak punya sumber-sumber mendapatkan uang. Ngamen, memulung, jualan koran, makanan kecil, banyak dilakukan orang dewasa. Di desa-desa juga anak-anak semakin sulit, lahan desa banyak dibeli orang kaya dengan luasnya hektaran. Kalaupun ada pohon pinang, kemiri, anak-anak tak bisa sedikit ikut ngutip pinang atau kemiri yang berserakan jatuh di tanah. Mereka pasti akan dimarah oleh sipenjaga perladangan orang kaya tersebut.

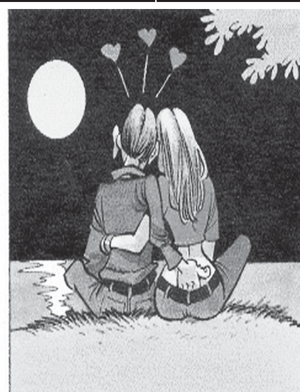
Karena telivisi atau koran sudah banyak didesa si Samin di kota maupun di desa pasti jiwanya menggerutu bila melihat iklan 'sekolah gratis dimana-mana'. "Yang gratis itu dimananya, apakah iklan itu tidak salah. Mengapa diiklankan seperti itu, ini sangat menyakitkan dan membuat muak,"gerutu si Samin yang tinggal diperkotaan, yang pemerintahan daerahnya tak peduli dan sungguh akan wajib belajar. Si Samin yang tinggal di pedesaan agak mending karena suasana desa bisa kompromi, dan terbawa suasana desa yang sejuk serta rasa malu yang masih kental, sehingga lembaga sekolah juga masih terbawa oleh suasana itu.

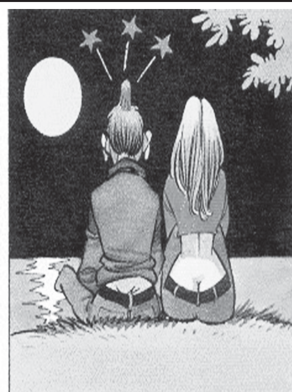
Si Samin sangatlah rindu dengan ibu Kartini, Dewi Sartikam rindu akan jiwanya, yang sekolah tidak hanya sekolah sekesar mencerdaskan otak. Namun sekolah ditekankan pada pendidikan emosional hidup lebih baik, pendidikan budi pekerti serta moral. Jiwa Kartini diharapkan masuk pada lembaga sekolah, bukan sekolah malah komersialisasi besar-besaran. Sekolah unggulan disebuah daerah dalam berita, ada banyak muridnya yang tak lulus ujian nasional. Terus apa yang diunggulkan, yang dikejar keunggulan otak ternyata tidak didapat juga. Sedangkan pendidikan budi pekerti agaknya sulit teraplikasi bila sekolah melakukan komersialisasi gila-gilaan.

Simpul-simpul ketidakpuasan, dan merasa ada ketidak adilan akan dunia sekolah tersimpan pada jiwa si Samin yang kebetulan mengenyam sekolahan. Ia merasa geram dan kesal. Karena kalau terus ada tipu-tipu sekolah gratis ternyata tidak, bangsanya akan sulit maju. Paling yang maju yang punya kesempatan. Itupun disangsikan pendidikan budi pekerti dan moralnya. Ia tak sanggup melihat banyak anak yang ngablun sekolah itu. Ketika anak-anak usia wajib bejar itu ditanya, "mengapa kalian tidak sekolah dik,". Mereka menjawab,"aku harus cari uang untuk beli buku paket". Lho katanya ada BOS. Sedang yang lain lagi menjawab, "orang tuaku tak sanggup memasukkan aku ke SMP, dan saya ke SMA,", anak-anak itu pasrah. Sakit memang melihat negeri yang anak-anaknya banyak ngablun sekolah.***

 Mesemmm… Mesemmm… 







I.L.M I.L.M I.L.M I.L.M I.L.M I.L.M

RELEASE KEGIATAN

Hari	: Rabu
Tanggal	: 10 Juni 2009
Waktu	: pukul 10.00 WIB
Kegiatan	: Rapat Koordinasi Pupuk Bersubsidi yang diselenggarakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten

Rapat Koordinasi yang diselenggarakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten dengan Komisi II DPRD Provinsi Banten dan beberapa SKPD terkait serta beberapa distributor pupuk adalah dalam rangka koordinasi mengenai pengamanan distribusi pupuk bersubsidi. Pupuk bersubsidi merupakan pupuk yang pengadaan dan penyalurannya mendapatkan subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan petani yang dilaksdanakan atas dasar program pemerintah di sector pertanian, jenis pupuk bersubsidi yaitu pupuk anorganik (Urea, SP-36, Superphos, ZA, NPK) dan pupuk organik.

Pupuk bersubsidi adalah barang dalam pengawasan, dengan ditetapkannya pupuk bersubsidi sebagai barang dalam pengawasan maka mengandung konsekwensi:

Pupuk bersubsidi bukan komoditi bebas, system pengadaan dan penyalurannya diatur dan diawasi oleh Pemerintah. Pelanggaran terhadap ketentuan di bidang pengadaan dan penyaluran dikenakan sanksi administrative dan sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Produsen, distributor dan pengecer wajib melaporkan realisasi pengadaan dan penyaluran sesuai ketentuan yang berlaku. Dijelaskan bahwa sampai saat ini distribusi pupuk bersubsidi di Provinsi Banten penyerapannya masih rendah. Berdasarkan SK Pertanian Tahun 2008 di Provinsi Banten hanya 68.000 ton yang terserap dari target 78.000 ton. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Hudaya menyampaikan bahwa perlu adanya pengawasan khusus dan salah satu permasalahan yang terjadi adalah harga pengecer tertinggi di pasaran mencapai Rp.1800,00/kg padahal dari produsen harga Rp.1300,00/kg.

Menurut Yayat Suhartono, Wakil Ketua Komisi II DPRD Provinsi Banten masalah pupuk merupakan masalah bersama, ketidakmampuan Pemerintah dalam menyelesaikan pupuk. Lahan pertanian bertambah namun nilai produktifitas menurun. Beliau menjelaskan bahwa terdapat 3 faktor penyebab permasalahan ini terjadi:

1. RDKK
2. Kekhawatiran para distributor karena terlalu ketatnya peraturan
3. terdapat kejenuhan distributor dan harus diperbaharui dengan dilakukan perekrutan SDM.

Dalam Rapat Koordinasi tersebut pihak PUSRI menjelaskan bahwa pendistribusian pupuk dilakukan secara rayonisasi yang disesuaikan dengan Permendagri No 07 Tahun 2009, yang diantaranya:

Pupuk Iskandar Muda	: NAD dan sekitarnya
PUSRI (Urea)	: Medan, Lampung, Banten, Jawa Tengah, Kalimantan Barat
Kujang	: Jawa Barat, dan sebagian kecil Jawa Tengah
Petrokimia	: Seluruh Indonesia
Kaltim	: Kalimantan dan Indonesia Bagian Timur.

Menurut PUSRI, Anggaran Subsidi dan Kapasitas Produksi terbatas, system distribusi seharusnya diawali dengan Kelompok tani menyusun RDKK yang didampingi tenaga Penyuluh Pertanian. Permasalhan system distribusi dengan RDKK adalah belum semua Petani tergabung dalam kelompok Tani dan data RDKK yang sudah ada belum seluruhnya benar.

Menurut Yayat Suhartono, permasalahan pupuk bersubsidi harus segera diselesaikan, dan harus ada solusi yang tepat. Beliau akan mencoba membuat Nota Komisi kepada Gubernur Banten untuk menyelesaikan masalah tersebut.

(**humasdprdbanten**)







foto: humas DPRD Provinsi Banten



KOMUNITAS

Komunikatif, Akrab dan Santun

Terbit Sejak 4 Oktober 2004. No SPS: 417/2004/10/B/2007

Edisi 02.V / Agustus 2009

Tak Seorang Pun Ingin Jadi Miskin

Siapa yang ingin hidup miskin? Tak seorang pun, sebab setiap orang mempunyai kebutuhan dan keinginan. Di zaman sekarang, pemenuhan kebutuhan dan keinginan itu, sebagian besar ditukar dengan sejumlah materi. Jadi siapa yang ingin hidup miskin? Tak seorang pun

Profil
Yayasan Bina Wanita Bahagia
VISI : WANITA BERKUALITAS, PILAR DAN KONTRIBUSI TERBENTUKNYA KEBAIKAN DAN KEMASLAHATAN SERTA KEJAYAAN UMAT
SEKRETARIAT :
Jl. Anggrek II Penancangan
P&K / Pipagas No. 4B Rt 03/04
Kel. Kaligandu - Serang - Banten
Telp. (0254) 220947, HP. 0811 12 3134
E-mail : binawanitabahagia@gmail.com
Menerima Dana Beasiswa, Zakat, Infaq Shodaqoh dan Waqaf
No. Rek. 07.00.01.004184 Bank Jabar Cab. Serang
a.n. Yayasan Bina Wanita Bahagia

Oleh
Feri Supriyatna

Tapi hidup miskin kadang bukan pilihan, tapi konsekwensi sosial yang harus diterima. Terlahir dari keluarga miskin memang bukan pilihan. Hidup pas-pasan, bahkan memenuhi kebutuhan makan layak saja sudah tak mampu. Puasa menjadi sahabat sepanjang tahun.

Keluar dari lingkaran kemiskinan bukanlah hal mudah. Perlu peran besar pemerintah. Sayangnya, peran itu hanya tertulis nyata di atas kertas kerja. Realitas di lapangan? Salah sasaran atau tidak sama sekali. Pertambahan orang miskin, sulit dihentikan.

Ijah Faijah, Ketua Yayasan Bina Wanita Bahagia (BWB) Banten, tak bermimpi menggantikan peran pemerintah itu. Pola pikirnya sederhana, melihat anak jalanan (anjal) sedang mengamen atau memulung barang-barang bekas, rasa kasihan timbul.

"Sebagian besar dari mereka, mengamen dan memulung barang bekas itu terpaksa. Ya untuk membantu orang tua mereka memenuhi kebutuhan sehari-hari. Paling tidak, untuk kebutuhan mereka sendiri. Sehingga tidak meminta pada orang tua," katanya.





Setelah dilakukan pengamatan, Ijah bercerita, maka dilakukan pendekatan. Awalnya memang sulit, mereka enggan menerima orang lain. "Dalam mengasuh dan membina anjal, kita harus banyak memberikan pengertian, sabar dan ikhlas. Sasaran anjal kami adalah usia antara 6 – 10 tahun," ujarnya.

Berkat keuletan, kesabaran dan keikhlasan, Yayasan BWB Banten yang didirikan 8 Pebruari 2009 ini, telah membina 169 anjal. "Alhamdulillah. Mereka sekolah di sini gratis. Gratis jauh sebelum pemerintah menyatakan sekolah itu gratis," kata pemimpin 25 pengurus.

Selain membina anjal, Yayasan BWB Banten juga melaksanakan kegiatan sekolah alternatif perempuan "SALIMAH" yang diperuntukan para pembantu, istri tukang becak, pedagang keliling kue dan sayur. Pesertanya sudah mencapai 77 orang.

"Kebahagiaan kami adalah saat anjal itu sudah tidak di jalan lagi. Misalnya, Jamal yang meraih juara 3 Catur se Provinsi Banten. Bukan cuma tidak di jalan, prestasi pun diraihnya," kata Ijah Faijah. (***f***)



